



+ED  
Sof2009

UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI

KARYA AKHIR

**ANALISIS ELEMEN DASAR PENGENAAN PAJAK  
DALAM IMPLEMENTASI AKUNTANSI PAJAK (PSAK 46)  
PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK JAKARTA**

DIAJUKAN OLEH :

**SUSANTO LAM**  
6604533831

T  
-----  
24502

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MENCAPAI GELAR  
MAGISTER AKUNTANSI  
2008**

**PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS INDONESIA**



**TANDA PERSETUJUAN KARYA AKHIR**

Nama : **Susanto Lam**  
Nomor Mahasiswa : **6604533831**  
Konsentrasi : **Perpajakan**  
Judul Karya Akhir : **Analisis Elemen Dasar Pengenaan Pajak Dalam Implementasi Akuntansi Pajak (PSAK 46) Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta**

31 JAN 2008

Tanggal : .....

Ketua Program Studi  
Magister Akuntansi



: **Setio Anggoro Dewo, Ph.D.**

Tanggal : .....  
24/1/08

Pembimbing Karya Akhir : **Prof. Dr. Gunadi**

## **Executive Summary**

A common understanding of earnings tax or firm's profit is that the greater the profit, the greater tax liability that must be paid by firm. In practice, the difference in deferred tax could be caused by positive and negative corrections, temporary and permanent difference on profit and expense according to commercial accounting and taxation regulation.

Firm has interest to augment the commercial profit, but tend to avoid tax on "additional" profit which should not have existed. To avoid taxation on these "additional" profit, firm must turn to negative correction, especially temporary difference. Based on this, a series of evaluation is conducted to scrutinize the correlation between firm's profit quality and its element of temporary correction.

Study and analysis is conducted upon firms that are registered at Jakarta Stock Exchange. In the selection it appears that several companies have not applied PSAK 46, probably due to immaterial aspect (0.1% of total asset) or something else. The data is then categorized into the amount of 2006 deferred tax which is calculated as percentage of average total asset (2005-2006). The number of firm with deferred tax more than 0.003 was 45 firms. To make equilibrium, 45 firms with deferred tax less than 0.002 was selected.

The conclusion is firm with big deferred tax, also has bigger total asset than its competitor. The largest component of deferred tax was deferred tax from tax loss carry forward (Phillips et. al. non discretionary management).

To be able to utilize deferred tax with its components as earning management detection, further categorization is needed to differentiate discretionary management from non discretionary management.

## **Ringkasan Eksekutif**

Pemahaman umum Pajak penghasilan terutang atas laba atau keuntungan perusahaan: makin besar laba, semakin besar pajak terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dalam pelaksanaannya, perhitungan pajak terutang bisa berbeda disebabkan koreksi positif dan koreksi negatif, akibat beda tetap dan beda sementara, atas konsep laba dan biaya menurut akuntansi komersial dan perpajakan.

Perusahaan memiliki kepentingan untuk memperbesar laba komersil, tetapi cenderung menghindari pajak atas laba "tambahan" yang seharusnya tidak ada. Untuk menghindari pajak atas laba "tambahan" ini perusahaan ini harus mengalihkan ke koreksi negatif khususnya beda temporer. Atas dasar ini dilakukan pengujian-pengujian terhadap hubungan antara kualitas laba perusahaan dan elemen/komponen koreksi beda temporer perusahaan.

Penelitian dan analisa dilakukan atas perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Jakarta. Dari seleksi ditemukan beberapa perusahaan belum menerapkan PSAK 46, mungkin terkait dengan aspek immaterial (0,1% dari total asset) atau lainnya. Selanjutnya data dikelompokkan atas dasar besaran pajak tangguhan dalam tahun 2006 yang dihitung dalam persentase terhadap rata-rata total asset (2005-2006). Data perusahaan yang memiliki pajak tangguhan lebih dari 0,003 terseleksi sebanyak 45 perusahaan, untuk mendapatkan pembandingan dipilih 45 perusahaan yang memiliki pajak tangguhan yang kurang dari (0,002).

Kesimpulannya adalah perusahaan dengan pajak tangguhan yang besar juga memiliki total asset lebih besar dari perusahaan tandingannya. Elemen/komponen terbesar dari pajak tangguhan berasal dari tax carry forward (rugi), yang jika merujuk Phillips et al, hal ini merupakan non discretionary manajemen.

Untuk bisa menggunakan pajak tangguhan dengan komponennya sebagai pendeteksi manajemen laba harus di tentukan kembali kategori daripada discretionary manajemen dan yang bukan discretionary manajemen

## KATA PENGANTAR

aPuji dan syukur ke hadirat Tuhan YME, karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan karya akhir yang berjudul **Analisis Elemen Dasar Pengenaan Pajak Dalam Implementasi Akuntansi Pajak (PSAK 46) Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta.**

Karya akhir ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna mencapai gelar Magister Akuntansi pada program studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Atas terselesaikannya karya akhir ini perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan sehingga terwujudnya karya akhir ini, terutama kepada :

1. Bapak Dr. Setio Anggoro Dewo, selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
2. Prof. Dr. Gunadi selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas masukan, saran dan bimbingannya selama penulisan karya akhir ini.
3. Seluruh dosen pengajar Program Studi Magister Akuntansi beserta staf dan karyawan.
4. Seluruh keluarga yang telah memberikan motivasi dan dukungan penuh selama penulis menempuh pendidikan ini.
5. Teman-teman di kampus dan di kantor atas dukungan dan segala bantuannya.

Besar harapan penulis semoga karya akhir ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan dan menjadi salah satu sumber informasi bagi pembacanya.

Jakarta, 8 Januari 2008

Penulis

## Daftar Isi

Executive Summary

Ringkasan Eksekutif

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I	Pendahuluan.....	1
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Perumusan masalah.....	5
	C. Tujuan penelitian.....	6
	D. Manfaat penelitian.....	6
	E. Metode penelitian.....	7
	F. Sistematika penulisan.....	8
Bab II	Tinjauan Pustaka.....	10
	2.1 Perkembangan Akutansi Pajak Penghasilan.....	10
	2.2. Hubungan akuntansi pajak dan akuntansi komersial.....	11
	2.2.1 Tujuan akuntansi komersial dan akuntansi komersial.....	11
	2.2.2 Pengakuan penghasilan menurut akuntansi dan pajak.....	14
	2.2.3 Pengakuan penghasilan menurut akuntansi dan pajak.....	16
	2.2.4 Aplikasi akuntansi pajak penghasilan.....	22
	2.2.4.1 Bada Tetap.....	22
	2.2.4.2 Bada waktu.....	24
	2.2.4.3 Kompensasi kerugian fiskal.....	25
	2.2.5 Tehnis aplikasi PSAK 46.....	27
	2.2.5.1 Rekonsiliasi fiskal.....	27
	2.2.5.2 Pajak kini.....	27
	2.2.5.3 Pajak tangguhan.....	27
	2.2.5.4 Efek perubahan tarif dan ketentuan perpajakan.....	30
	2.2.5.5 Pengungkapan pada laporan keuangan.....	31
	2.3. Manajemen laba.....	33
	2.3.a Definisi manajemen laba.....	33

2.3.b	Penelitian-penelitian terhadap manajemen laba.....	36
2.3.b.1	Penelitian diluar Indonesia.....	36
2.3.b.2	Penelitian di Indonesia.....	41
2.3.c	Metode manajemen laba.....	43
2.3.d	Pengukuran manajemen laba.....	48
2.3.d.1	Penggunaan distribusi laba dalam memprediksi manajemen laba..	49
2.3.d.2	Pengukuran manajemen laba dengan diskretonari akrual.....	50
2.3.d.3	Pengukuran manajemen laba dengan DTE.....	51
2.3.d.4	Pengukuran manajemen laba dengan komponen DTL.....	53
<b>Bab III</b>	<b>Metode penelitian.....</b>	<b>55</b>
3.1	Desain penelitian.....	55
3.1.1	Tujuan penelitian.....	55
3.1.2	Type dari penelitian.....	55
3.1.3	Keterlibatan penulis dengan penelitian.....	56
3.1.4	Setting penelitian.....	56
3.1.5	Unit analisa : organizations.....	56
3.1.6	Horizon waktu.....	56
3.2	Tehnik pengumpulan data.....	56
3.3	Obyek penelitian.....	56
3.4	Definisi variable penelitian.....	57
3.5	Keterbatasan data penelitian .....	57
<b>Bab IV</b>	<b>Pembahasan dan analisa.....</b>	<b>59</b>
4.1	Gambaran data yang diteliti.....	59
4.1.1	Komposisi data.....	60
4.1.2	Data perusahaan yang tidak menerapkan PSAK 46.....	60
4.1.2.1	Perusahaan dengan laporan keuangan yang tidak memiliki account DTA, DTL, ataupun DTE.....	61
4.1.2.2	Perusahaan dengan laporan keuangan yang tidak	

	memiliki account DTA, DTL, ataupun DTE tetapi tidak mengikuti formula ataupun rumusan DTE atau (DTI) = Perubahan DTA +/- Perubahan DTL.....	63
4.2.	Analisa komponen beban/(manfaat) paak tanggihan.....	67
4.2.1	Analisa komponen beban/(manfaat) pajak tanggihan Total perusahaan.....	71
4.2.2	Analisa Komponen beban/(manfaat) pajak tanggihan Berdasarkan sektor perusahaan .....	74
Bab V	Kesimpulan dan saran.....	81
	5.1 Kesimpulan.....	81
	5.2 Saran.....	82
	Daftar Pustaka.....	84
	Bibliografi.....	87
Tabel		
	- Penelitian terhadap komponen DTL 45 perusahaan - rekap	
	- Penelitian terhadap komponen DTL 45 perusahaan – berdasarkan sektor –total	
	- Penelitian terhadap komponen DTL 45 perusahaan – berdasarkan sektor –rata-rata	
	- Rekap Data perusahaan yang diteliti (270 perusahaan)	
Biografi		

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam menghadapi era globalisasi, Ikatan Akuntan Indonesia selalu melakukan penyesuaian Standar Akuntansi Keuangan agar dapat menghadapi tantangan dan perkembangan sebagai efek globalisasi. Salah satu Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan oleh IAI untuk mengantisipasi dinamika bisnis adalah PSAK 46.

PSAK 46 dibuat dengan tujuan memberikan informasi yang benar, baik dan proporsional akan harta dan kewajiban perpajakan perusahaan. Peraturan perpajakan yang terkait adalah SPT PPh 1771, yang dibuat dengan tujuan memberikan informasi harta dan perpajakan perusahaan.

Berdasarkan sejarah<sup>1</sup>, sistem pemungutan pajak penghasilan yang pernah dilaksanakan di Indonesia adalah :

- Sistem *official assesment*, dilaksanakan sampai pada tahun 1967
- Sistem *semi self assesment* dan *withholding* dilaksanakan pada periode 1968-1983
- Sistem *full self assesment* dilaksanakan secara efektif pada tahun 1984 atas dasar perombakan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983

---

<sup>1</sup> Judisseno, Rimsk K. (2005). *Pajak & Strategi Bisnis: Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*. Edisi Revisi. (Gramedia, 2005), hlm. 24

Sistem *self-assessment* artinya negara memberikan otonomi yang luas kepada setiap wajib pajak untuk dapat secara aktif mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pemenuhan kewajiban perpajakannya

Dalam pelaksanaan *self-assessment*, setiap Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, harus melaksanakan pembukuan berdasarkan Pasal 28 UU KUP Tahun 2007. Di dalamnya dinyatakan bahwa pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir

Sirkuler No.SE-50/PJ.71/1989, menyebutkan tiga arti pentingnya pembukuan untuk perpajakan yaitu <sup>2</sup>:

- (a) mempermudah Wajib Pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan penghasilan;
- (b) mempermudah perhitungan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- (c) penyajian informasi tentang posisi finansial dan hasil usaha (pekerjaan bebas wajib pajak) untuk bahan analisis maupun pengambilan keputusan ekonomi perusahaan.

---

<sup>2</sup>Gunadi.(1997). *Akuntansi Pajak: Sesuai dengan Undang-undang Pajak Baru*. (Grasindo,1997), hlm.1-2

Untuk mengamankan kebijakan dan tujuan sistem perpajakan beberapa persyaratan digariskan oleh ketentuan perpajakan. Persyaratan itu antara lain sebagai berikut ( Pasal 28 UU KUP )<sup>3</sup>:

- pembukuan harus diselenggarakan dengan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian.
- Pembukuan harus ditutup setiap akhir tahun dengan membuat neraca atau laporan laba-rugi berdasarkan prinsip pembukuan yang taat asas (konsisten dengan tahun sebelumnya).
- Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan bahasa Indonesia dan satuan mata uang rupiah (atau dengan bahasa Inggris dan mata uang US\$ dengan izin Menteri Keuangan).
- Pembukuan atau pencatatan dan dokumen yang menjadi dasarnya serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha (pekerjaan bebas) yang harus disimpan selama sepuluh tahun.

Tidak semua Wajib Pajak mampu menyelenggarakan pembukuan, pasal 14 (2) UU PPh menyatakan bahwa : terhadap wajib pajak orang pribadi

---

<sup>3</sup> Ibid.,3-4

yang tidak menyelenggarakan pembukuan dengan tujuan perhitungan pajak, penghasilan netto nya dihitung berdasarkan norma perhitungan.

Pemahaman secara umum berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, bahwa Pajak penghasilan terutang atas laba atau keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan. Makin besar laba yang diperoleh, semakin besar pajak terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Dalam pelaksanaannya, perhitungan pajak terutang tidak mutlak seperti di atas. Hal ini disebabkan dalam prakteknya ada koreksi positif dan koreksi negatif, akibat beda tetap dan beda sementara pencatatan laba dan biaya menurut akuntansi komersial dan menurut pelaporan perpajakan. Bagi perusahaan yang orientasinya adalah memperoleh laba setelah pajak sebesar-besarnya, akan semaksimal mungkin berusaha mendapatkan koreksi negatif sebesar-besarnya, sementara koreksi positif tidak diperbolehkan.

Hal ini menimbulkan beberapa persoalan dalam praktek, diantaranya adalah apakah indikator dari koreksi negatif yang seharusnya tidak ada tetapi dibuat seolah-olah ada ? Apa indikator dari koreksi positif yang seharusnya ada tetapi tidak ada? Apakah ada praktek manajemen laba (*earnings management?*) Komponen Dasar Pengenaan Pajak yang mana yang memberikan kontribusi atas koreksi positif dan koreksi negatif?

Untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut, dalam penelitian ini akan dilakukan pengujian dan analisa data atas perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Jakarta.

Dari analisa data akan dikupas secara mendalam komponen Dasar Pengenaan Pajak perusahaan dan menganalisa dari teori manajemen laba dan diuji dengan konteks peraturan pajak yang berlaku untuk mendapatkan kesimpulan.

## **B. Perumusan Masalah**

PSAK 46 yang dikeluarkan oleh IAI, tidak mudah dipahami dan implementasinya dalam pelaporan keuangan juga tidak mudah dicerna. Komponen PSAK 46 menambahkan unsur komponen laporan keuangan yang sudah ada.

Akun<sup>4</sup> Neraca pada sisi Aset: Komponen Pajak Dibayar Dimuka (Prepaid Tax), sisi Kewajiban: utang Pajak (Tax Payable) dengan PSAK 46 akan ditambahkan Aset Pajak Tangguhan (Deferred Tax Asset) dan Kewajiban Pajak Tangguhan (Deferred Tax Liability), sedang Akun Laporan Laba Rugi: Beban PPh (income tax expense) ditambahkan Penghasilan Pajak tangguhan (deferred tax income) dan beban pajak tangguhan (deferred tax expense)

Efek dari tambahan komponen ini menambah komplikasi dari laporan keuangan, tetapi diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih bagi

---

<sup>4</sup> Agoes, Sukrisno & Trisnawati, Estralita. Akuntansi Perpajakan. (Salemba Empat 2007), hlm 6-7

pembaca laporan akan konsekuensi perpajakan perusahaan. Perumusan masalah yang diajukan adalah :

1. Apa arti dan tujuan penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan (PSAK 46) bagi perusahaan? Apakah bisa memberikan peluang "keleluasaan/kebebasan" bagi perusahaan untuk melaporkan laba kena pajak serendah mungkin dan atau melaporkan laba komersial setinggi mungkin?
2. Apakah ada hubungan antara pelaporan PSAK 46 oleh perusahaan dengan laba komersialnya? Dapatkan unsur komponen pajak tangguhan memberikan indikasi kualitas laba komersial perusahaan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis penerapan Akuntansi Pajak Tangguhan bagi perusahaan.
2. Menganalisis hubungan antara pelaporan PSAK 46 oleh perusahaan dengan kualitas laba komersialnya.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Akademis**

Manfaat penelitian ini secara akademis adalah :

- a. Memberikan gambaran yang jelas tentang implementasi PSAK 46 dalam kaitannya dengan laporan perpajakan
- b. Memperoleh gambaran kemampuan unsur pajak tangguhan dalam PSAK 46 menganalisa kinerja perusahaan.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Memberi masukan bagi investor dan stakeholder lainnya untuk bagaimana memahami kinerja perusahaan melalui laporan keuangan PSAK 46.
- b. Memberikan sumbang saran kepada pemerintah (dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak) tentang kajian yang tepat atas laporan keuangan perusahaan yang menggunakan PSAK 46 sebagai upaya untuk menggali potensi penerimaan pajak sekaligus sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum yang sangat diperlukan para investor.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan berupaya memberikan terlebih dulu gambaran mengenai *Accounting for Income Taxes* di Indonesia serta konsep-konsep akuntansi dan perpajakan yang terkait. Selanjutnya penulis mengemukakan aspek-aspek manajemen laba dan kaitannya dengan pajak tangguhan (PSAK 46). Terakhir adalah

dilakukan analisis terhadap implementasi PSAK 46 di Indonesia apakah dapat digunakan untuk meramalkan kualitas laba dari manajemen.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data sekunder berupa studi kepustakaan dengan tujuan mendapatkan landasan teoritis yang diperlukan dalam melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan implementasi pajak tangguhan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Karya akhir ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, dan metode penelitian.

Bab II: Tinjauan Pustaka, yang menguraikan ketentuan akuntansi sehubungan dengan akuntansi pajak penghasilan - PSAK 46, penelitian-penelitian terhadap manajemen laba. Dan akhirnya penelitian manajemen laba yang memanfaatkan komponen pajak tangguhan yang akan dijadikan sebagai landasan pembahasan materi karya akhir.

Bab III: Metodologi Penelitian, yang menguraikan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sampling, metode analisis data.

Bab IV: Pembahasan dan Analisis, menguraikan temuan hasil penelitian dan analisis berdasarkan landasan teori yang digunakan.

Bab V: Kesimpulan dan Saran, memuat kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran-saran perbaikan peraturan yang dianggap perlu.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Perkembangan Akuntansi Pajak Penghasilan

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengadopsi IAS No.12 dengan mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan. Pernyataan standar ini mulai diberlakukan efektif sejak tanggal 1 Januari 1999 bagi perusahaan yang telah *go public* dan 1 Januari 2001 bagi perusahaan tertutup. Sebelum diberlakukan PSAK No.46, IAI menggunakan metode penangguhan (*deferral method*) yang diatur melalui Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI)<sup>1</sup>

PSAK No.46 menerapkan pendekatan neraca (*balance sheet approach*) dalam memperlakukan alokasi perbedaan beban pajak antara Surat Pemberitahuan Tahunan pajak penghasilan badan dan laporan keuangan komersial. Hal tersebut timbul akibat perbedaan antara ketentuan peraturan perpajakan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dalam menetapkan beban dan pendapatan yang diperhitungkan dalam menghitung laba.

Penerapan PSAK No.46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan mengakibatkan berkurangnya laba atau rugi bersih yang disajikan pada laporan keuangan. Hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya dividen jauh

---

<sup>1</sup> Purba, Marisi P. & Andreas. Akuntansi Pajak Penghasilan Berdasarkan IAS No.12 & PSAK No.46: Graha Ilmu 2005 hlm5

dari yang diharapkan, hingga pernah dikeluhkan oleh sebagian pemegang saham perusahaan publik pada saat standar ini pertama kali diterapkan.

Sistem perpajakan dengan *self-assessment* mengharuskan Wajib Pajak menghitung sendiri beban pajak yang harus dibayar. Beban pajak ini disebut juga dengan pajak kini (*current tax*), yang ditentukan berdasarkan peraturan perpajakan sebagaimana disampaikan dalam SPT pajak penghasilan badan.<sup>2</sup>

Pajak kini berasal dari perhitungan tarif pajak efektif dikalikan dengan penghasilan kena pajak (*taxable income*) yang diperoleh dari laba akuntansi setelah dikoreksi berdasarkan peraturan perpajakan. Proses koreksi ini biasa disebut dengan rekonsiliasi fiskal. Hal-hal yang dikoreksi terhadap pendapatan dan beban telah diatur dalam Undang-undang No.10 tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

## **2.2 Hubungan akuntansi pajak dan akuntansi komersial**

### **2.2.1 Tujuan akuntansi pajak dan akuntansi komersial**

Gunadi<sup>3</sup> menyatakan bahwa tujuan akuntansi komersial antara lain untuk menyediakan laporan dan informasi keuangan serta informasi yang lain kepada, *misalnya*, pimpinan perusahaan. Sedang akuntansi perpajakan secara khusus menyajikan laporan keuangan dan informasi lain kepada

---

<sup>2</sup> Ibid, hlm 7

<sup>3</sup> Gunadi, Akuntansi Pajak :Grasindo 1998, hlm 7

administrasi pajak. Penyajian itu sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan (tax compliance).

Hutagaol<sup>4</sup> juga memberikan statement yang sama bahwa tujuan akuntansi komersial antara lain untuk menyediakan laporan dan informasi keuangan serta informasi yang lain kepada, *stakeholder* Sedang akuntansi perpajakan secara khusus menyajikan laporan keuangan dan informasi lain kepada administrasi pajak. Namun pada umumnya konsep-konsep dasar akuntansi yang tercantum pada SAK 1999 dapat berlaku pada keduanya (baik akuntansi komersial maupun akuntansi pajak).

Lebih jauh menurut Hutagaol, laporan dan informasi yang dihasilkan dari akuntansi pajak ditujukan untuk administrasi pajak, maka laporan dan informasi keuangan tersebut harus memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal ini menyebabkan perbedaan antara kebijakan akuntansi komersial dan fiskal dalam penyelenggaraan pembukuan.

Selanjutnya Gunadi<sup>5</sup> menyatakan bahwa negara (administrasi pajak) lebih berkepentingan terhadap satu atau beberapa unsur dalam laporan keuangan yang dilampirkan pada SPT. Unsur-unsur itu meliputi (a) laba tahun berjalan; (b) distribusi laba (untuk penghitungan potongan pajak atas dividen); (c) peredaran (untuk PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)); (d) pengeluaran untuk karyawan dan pembelian jasa yang lain (untuk penghitungan potongan pajak penghasilan).

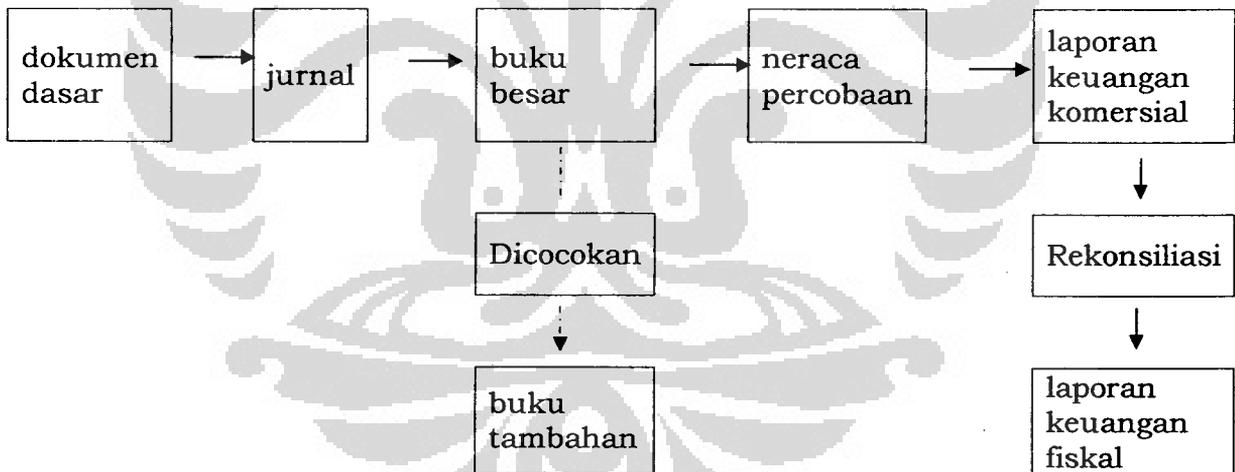
---

<sup>4</sup> Hutagaol, John. Kapita selekta akuntansi pajak: Kharisma 2003 pengantar hlm iii

<sup>5</sup> Gunadi, ibid, hlm 20

Pelaporan keuangan komersial disusun berdasarkan konsep "kewajaran penyajian" dengan implikasi manajemen dapat mengambil suatu pertimbangan (*judgement*) sepanjang batasan toleransi prinsip akuntansi. Apabila terdapat keraguan pengukuran atas suatu transaksi (yang belum merupakan fakta), prinsip konservatisme dalam akuntansi komersial cenderung untuk mengambil solusi yang menghasilkan keadaan *under stated* agar laporan tampak *low profile*. Laporan fiskal, umumnya kurang memberikan toleransi atau fleksibilitas pemilihan standar.

**Skema Proses pembuatan laporan keuangan fiskal<sup>6</sup>**



<sup>6</sup> Gunadi, ibid, hlm 25

### **2.2.2 Pengakuan penghasilan menurut akuntansi dan pajak**

Sesuai PSAK No. 23,

Penghasilan didefinisikan sebagai *peningkatan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.*

Penghasilan (income) meliputi baik pendapatan (revenue) maupun keuntungan (gain).

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fee), bunga dividen, royalti, dan sewa

Gunadi<sup>7</sup> menyatakan terdapat dua pendekatan pendefinisian penghasilan yaitu pendekatan sumber (source concept of income) dan pendekatan pertambahan (accretion concept of income).

Berbeda dengan ketentuan perpajakan sebelum tahun 1983 (Pasal 2 b Ordonansi PPd 1944) yang menganut konsep sumber ("source concept of income"), UU PPh dalam memberikan pengertian penghasilan, mengikuti konsep pertambahan ("accretion concept of income").

Pasal 4(1)(a) – (p) UU PPh, yang dapat merupakan penghasilan badan antara lain, adalah (1) laba usaha, (2) keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta, (3) penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, (4) bunga, royalti, dividen dan sewa, (5)

---

<sup>7</sup> Gunadi, Pajak Internasional, Lembaga Penerbit FE UI, 2007 hlm 17

keuntungan karena pembebasan utang, (6) keuntungan karena selisih kurs mata uang asing, (7) selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap, (8) iuran dari para anggota, dan (9) tambahan kekayaan neto.

Dalam praktek akuntansi komersial, penghasilan neto merujuk kepada kelebihan jumlah pendapatan di atas biaya dan beban (expenses).

Menurut Pasal 4 ayat (1) UU PPh, secara abstrack konsepsional menyatakan penghasilan meliputi tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan.

Sehubungan dengan penghitungan penghasilan kena pajak, metode kas dapat dipakai untuk menggeser penghasilan dari satu ke lain tahun untuk memperoleh penghematan pajak. Untuk menetralsir hal itu, ketentuan perpajakan menyatakan untuk keperluan perpajakan metode kas harus dimodifikasi sebagai berikut :

1. Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun bukan. Dengan kata lain, untuk penjualan dipakai metode akrual. Demikian juga dalam menghitung harga pokok penjualan harus dikaitkan dengan jumlah yang terjual itu (proper matching)
2. Pengeluaran untuk memperoleh harta yang dapat disusutkan atau hak-hak yang dapat diamortisasi harus dikapitalisasi dan dikurangkan dari penghasilan bruto melalui depresiasi dan amortisasi

### **2.2.3 Pengakuan beban menurut akuntansi dan pajak**

Definisi beban (expenses) menurut akuntansi<sup>8</sup> adalah *penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.*

Cakupan definisi beban menurut akuntansi

Baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa meliputi, misalnya beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Beban tersebut biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas (dan setara kas), persediaan dan aktiva tetap.

Menurut Gunadi, matching beban dengan penghasilan merupakan masalah yang cukup rumit. Dalam praktek terdapat tiga pendekatan pengaitan biaya dengan penghasilan yaitu (1) sebab-akibat (kausalitas);(2) alokasi sistematis dan rasional;(3) pengakuan segera.

Untuk tujuan perpajakan tidak semua biaya dapat dikurangkan. Untuk tujuan pajak koreksi biaya dapat dilakukan dalam tahun yang sama langsung ke rugi-laba.

---

<sup>8</sup> PSAK, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan hlm 23

**Yang boleh dikurangkan** menurut Pasal 6(1) (a) UU PPh menentukan kelompok revenue expenditures, (1) biaya perolehan bahan (materials), (2) biaya kekarya-an, (3) bunga, sewa dan royalti, (4) biaya perjalanan, (5) biaya pengolahan limbah, (6) premi asuransi, (7) piutang yang nyata-nyata tidak tertagih, (8) biaya administrasi dan (9) pajak selain pajak penghasilan. Prof Gunadi, berbeda dengan penghapusbukuan (debt written off) dalam akuntansi komersial pembiayaan piutang yang tidak tertagih (untuk perpajakan) harus setelah diupayakan secara maksimal penagihannya (dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa piutang itu telah diserahkan ke pengadilan atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara)

- Pasal 6(1)(b) UU PPh, beban Depresiasi atau amortisasi atas pengeluaran kapital untuk memperoleh tangible fixed assets maupun intangible asset
- Biaya lainnya (1) iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, (2) kerugiankapital, (3) kerugian selisih kurs mata uang asing, (4) biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia, dan (5) biaya bea siswa, magang dan pelatihan karyawan

**Yang tidak boleh dikurangkan** menurut Pasal 9(1) UU PPh, beberapa pengeluaran yang tidak boleh dibiayakan termasuk : (1) pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, (2) pengeluaran atau biaya untuk pesero dan anggota, (3) pembentukan atau pemupukan dana cadangan (kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha perbankan dan sewa guna usaha dengan hak opsi dan cadangan premi asuransi serta cadangan

reklamasi untuk usaha pertambangan), (4) penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan (dengan perkecualian dengan pelaksanaan pekerjaan), (5) jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayar kepada penyedia penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, (6) hibah, bantuan dan sumbangan, (7) pajak penghasilan, (8) pembayaran gaji kepada sekutu atau anggota firma, dan (9) sanksi administrasi dan pidana pajak

Menurut Prof Gunadi, pembagian laba (dividen, pembagian sisa hasil usaha koperasi, dan dividen perusahaan asuransi kepada pemegang polis) tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak badan. Selanjutnya pembagian tersebut dapat dikenakan pajak pada penerimanya (double economic taxation of dividends). Hal itu merupakan ciri khas dari sistem pajak penghasilan klasik (classical system of income taxation) sebagaimana diikuti beberapa negara termasuk Indonesia.

Pasal 4(3) UU PPh memberikan daftar (nominatif) negatif (negative list) tentang kemampuan ekonomis yang bukan merupakan objek pajak, antara lain (1) bantuan, sumbangan dan hibah yang tidak berhubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara para pihak yang bersangkutan, (2) harta (termasuk setoran tunai) yang diterima badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal (kontribusi kapital), (3) dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WPDN, koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, (4) iuran yang

telah diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, (5) bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana, dan bagian laba yang diterima perusahaan modal ventura.

### ***PPh final***

Menurut Prof Gunadi<sup>9</sup>, dalam pengenaan pajak, Indonesia menganut sistem unitary atau global. Berbeda dengan sistem schedular (dengan pengaturan pemajakan yang berbeda untuk tiap kategori penghasilan digunggung (tambah dan kurang) sehingga menjadi satu kesatuan (unit) tanpa membedakan asal penghasilan (global) dan dikenakan pajak dengan tarif yang sama (uniform rate). Untuk tujuan kemudahan dan kesederhanaan administrasi serta kepastian hukum bagi wajib pajak, beberapa kategori penghasilan tertentu (berdasarkan kuasa pasal4(2) UU PPh) dikenakan pajak tersendiri (dengan tarif sepadan(flat rate) dan bersifat final

- dalam mengurangi biaya (pengeluaran) perlu memperhatikan 2 faktor (1) masa manfaat (2) hubungan biaya dengan penghasilan. Berbeda dengan Ketentuan lama, pengeluaran yang merupakan pembayaran biaya dimuka (prepaid expenses), seperti sewa untuk beberapa tahun, dibebankan melalui sistem alokasi selama masa manfaatnya (bukan amortisasi sebagaimana terjadi pada ketentuan lama)

---

<sup>9</sup> Gunadi, Pajak Internasional, Lembaga Penerbit FE UI, 2007 hlm 18-19

- "match and link", yang dapat dibebankan pada penghasilan kena pajak terbatas pada biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan kena pajak.
- Penjelasan pasal 6(1)(a) menyebutkan bahwa pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
- Biaya bersama (common costs) atau bergabung (join costs) pembebanannya dialokasikan secara proporsional kepada penghasilan yang kena dan bukan objek pajak
- Pengeluaran yang bersifat pribadi (private expenditures), juga tidak dapat dikurangkan.
- Pengeluaran untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final.
- Arm's-length expenses, Menurut **prof Gunadi**, merupakan kelaziman yang diterima umum bahwa di antara perusahaan terdapat kecenderungan untuk membayar pajak serendah mungkin. Upaya tersebut antara lain, dilakukan melalui upaya mark-up biaya. Penjelasan pasal 6(1)(a) menentukan bahwa biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan upaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak adalah harus dalam jumlah yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik.

### **Kompensasi kerugian**

Pasal 6(2) UU PPh menyatakan bahwa kerugian pada suatu tahun pajak dapat diperhitungkan dengan penghasilan tahun berikutnya secara berturut-turut sampai dengan 5 tahun.

Penjelasan Pasal 4(1), kompensasi kerugian tidak berlaku untuk kerugian dari usaha atau kegiatan di luar Indonesia (walaupun kita menganut sistem pemajakan global)

### **Keuntungan dan Kerugian Pengalihan Barang Modal**

Pasal 4(1)(d) UU PPh, keuntungan karena pengalihan atau penjualan barang modal merupakan penghasilan kena pajak.

Pasal 4(2) UU PPh, pemajakan atas (penghasilan dari) penjualan tanah dan bangunan di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 1994 (telah disempurnakan dengan PP Nomor 27 tahun 1996), atas penjualan tanah dan bangunan, badan penjual diwajibkan menyeter pajak (pendahuluan) sebanyak 5% dari jumlah bruto penjualan.

Keuntungan kapital dari harta selain tanah dan bangunan dikenakan pajak selayaknya laba usaha.

### **Dividen Antar badan**

- Pasal 4(3)(f) mengecualikan dividen (participation exemption) yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas, koperasi, yayasan, atau organisasi sejenis, BUMN dan BUMD.

- Pembebasan diberikan bila (1) penerima adalah badan WPDN, dan (2) pembagi dividen adalah badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.

#### **2.2.4 Aplikasi akuntansi pajak penghasilan**

Menurut Sukrisno Agoes<sup>10</sup> dalam akuntansi pajak penghasilan, laba dibedakan antara laba akuntansi (accounting profit), laba komersial dengan laba fiskal (taxable profit), atau Penghasilan kena pajak.

Mengacu PSAK 46

Laba akuntansi adalah laba atau rugi bersih selama satu periode sebelum dikurangi beban pajak.

Laba fiskal (taxable profit) atau Penghasilan Kena pajak atau rugi pajak (tax loss) adalah laba atau rugi selama satu periode yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan

Dalam uraian 2.2.3 telah dibahas konsep penghasilan dan beban menurut pajak dan menurut accounting, yang menghasilkan perbedaan – perbedaan (1) beda tetap (2) beda waktu

##### **2.2.4.1 Beda Tetap**

Beda tetap (*permanent difference*) disebabkan adanya perbedaan pengakuan beban dan pendapatan antara pelaporan komersial dan fiskal. Pendapatan dan beban tertentu diakui pada SPT namun tidak diakui pada

---

<sup>10</sup> Agoes, Sukrisno & Trisnawati, Estralita. Akuntansi Perpajakan: Salemba Empat 2007 hlm 197

laporan keuangan atau sebaliknya. Perbedaan ini mengakibatkan laba fiskal berbeda dengan laba komersial.

Undang-undang No.17 tahun 2000 menjelaskan adanya penerimaan-penerimaan yang tidak merupakan objek pajak dan pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan terhadap penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan. Penerimaan-penerimaan dan pengeluaran-pengeluaran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan deviden, bunga, royalti, sewa, hadiah, penghargaan dan imbalan jasa tertentu yang sudah dikenakan pajak final,
- b. Penggantian imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa karyawan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali yang ditetapkan lain dalam peraturan menteri keuangan,
- c. Jumlah imbalan yang melebihi kewajiban yang dibagikan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa, seperti pemberian gaji yang terlalu besar, pembayaran bunga atas pinjaman di atas bunga pasar dan sebagainya,
- d. Beban kontribusi sosial seperti sumbangan dan zakat,
- e. Sanksi perpajakan berupa denda dan bunga,
- f. Beban-beban yang berkaitan dengan jamuan,
- g. Pajak penghasilan,
- h. dan lain-lain.

Atas beda tetap ini tidak berpengaruh terhadap seluruh komponen pajak tangguhan [aktiva pajak tangguhan, kewajiban pajak tangguhan, manfaat pajak tangguhan ataupun beban pajak tangguhan]

#### **2.2.4.2 Beda Waktu**

Beda waktu (*temporary difference*) disebabkan adanya perbedaan waktu dan metode pengakuan penghasilan dan beban tertentu menurut akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Perbedaan ini mengakibatkan pergeseran pengakuan beban antara satu tahun pajak ke tahun pajak lainnya. Perbedaan-perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penyisihan piutang ragu-ragu berdasarkan perpajakan akan diakui jika telah nyata-nyata tidak dapat ditagih dan diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Namun berdasarkan pelaporan komersial, piutang usaha disisihkan berdasarkan analisa umur piutang tersebut,
- b. Berdasarkan peraturan perpajakan, aktiva yang berasal dari sewa guna usaha pembiayaan (*capital lease*) tidak boleh disusutkan oleh penyewa, sehingga angsuran pokok sewa guna usaha harus diakui sebagai biaya. Pelaporan komersial mengharuskan penyusutan bagi aktiva yang berasal dari sewa guna usaha pembiayaan (*capital lease*),

- c. Penilaian persediaan dapat berbeda antara pelaporan perpajakan dan komersial. Perpajakan hanya mengakui dua metode yaitu metode rata-rata (*average*) dan metode masuk pertama keluar pertama (FIFO), sementara dalam pelaporan komersial kita mengenal metode lain seperti masuk terakhir keluar pertama (LIFO), nilai terendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih dan lain-lain.
- d. Dalam perpajakan, penyusutan aktiva tetap baik yang berwujud maupun yang tak berwujud dikenal dengan dua metode penyusutan, yaitu metode garis lurus (*straight-line method*) dan metode saldo menurun (*decline balance method*). Peraturan perpajakan juga menetapkan umur aktiva tetap berdasarkan golongan-golongan.
- e. Untuk aktiva tak berwujud, perpajakan tidak mengakui beban yang berkaitan dengan pencadangan imbalan pasca kerja berdasarkan Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun beban tersebut dibukukan pada laporan keuangan komersial.
- f. dan lain-lain.

Atas beda sementara ini menimbulkan komponen pajak tangguhan baik aktiva pajak tangguhan, kewajiban pajak tangguhan, manfaat pajak tangguhan ataupun beban pajak tangguhan.

### 2.2.4.3 Kompensasi Kerugian Fiskal

Undang-undang No.17 tahun 2000 pasal 6, membolehkan kompensasi atas kerugian fiskal selama 5 tahun berturut-turut (*fiscal loss carry forward*). Kompensasi kerugian akan mengakibatkan berkurangnya laba kena pajak, sehingga akan mengurangi beban pajak kini pada tahun-tahun berikutnya. Laporan keuangan harus mengungkapkan besarnya rugi fiskal yang masih dapat dikompensasi pada catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan PP1 tahun 2007 untuk menunjang insentif investasi (penanaman modal baru) ke Indonesia di kawasan industri dan kawasan berikat diberlakukan kondisi kompensasi kerugian 5 – 10 tahun, dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) tambahan 1 tahun: apabila penanaman modal baru pada bidang usaha yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan di kawasan industri dan kawasan berikat;
- 2) tambahan 1 tahun: apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
- 3) tambahan 1 tahun: apabila penanaman modal baru memerlukan investasi/pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- 4) tambahan 1 tahun: apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari investasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan/atau

- 5) tambahan 1 tahun: apabila menggunakan bahan baku dan atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sejak tahun ke 4 (empat).

## **2.2.5 Tehnis aplikasi PSAK 46**

### **2.2.5.1 Rekonsiliasi Fiskal**

Perhitungan pajak penghasilan *kini* dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan koreksi atas penghasilan sebelum pajak yang berasal dari laporan laba rugi. Koreksi ini dilakukan agar laba akuntansi disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga akan dihasilkan laba fiskal. Koreksi fiskal dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu beda permanen (*permanent difference*) dan beda temporer (*temporary difference*)<sup>11</sup>.

### **2.2.5.2 Pajak Kini**

Pajak *kini* adalah beban pajak penghasilan perusahaan (badan) yang dihitung berdasarkan tarif efektif pajak penghasilan dikalikan dengan laba akuntansi yang telah dikoreksi agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Pajak penghasilan kini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu final dan non-final.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Purba, Marisi P. & Andreas. Akuntansi Pajak Penghasilan Berdasarkan IAS No.12 & PSAK No.46:Graha Ilmu 2005 hlm8

<sup>12</sup> Ibid hlm13

### 2.2.5.3 Pajak Tangguhan

Banyak orang beranggapan bahwa PSAK No.46 tentang Akuntansi Pajak Penghasilan sepenuhnya hanya membahas masalah perlakuan pajak tangguhan. Padahal pajak tangguhan merupakan salah satu bagian dari PSAK No.46. Hal ini disebabkan permasalahan pajak tangguhan adalah bagian yang paling sulit dimengerti. Pengakuan pajak tangguhan dapat berdampak terhadap berkurangnya laba bersih atau berkurangnya rugi bersih. Hal ini disebabkan karena adanya kemungkinan pengakuan beban pajak tangguhan atau manfaat pajak tangguhan.<sup>13</sup>

Pengakuan aktiva dan kewajiban pajak tangguhan didasarkan pada fakta adanya kemungkinan pemulihan aktiva atau pelunasan kewajiban yang mengakibatkan pembayaran pajak pada periode mendatang menjadi lebih besar atau lebih kecil dibandingkan pembayaran pajak sebagai akibat pemulihan aktiva atau pelunasan kewajiban yang tidak memiliki konsekuensi pajak. Kemungkinan pembayaran pajak yang lebih kecil pada masa yang akan datang dapat dianggap sebagai suatu aktiva. Berdasarkan teori akuntansi, aktiva didefinisikan sebagai suatu kemungkinan akan adanya manfaat ekonomi pada masa yang akan datang yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian pada masa lalu. Suatu rugi fiskal yang masih dapat dikompensasikan merupakan suatu contoh kemungkinan adanya manfaat ekonomi pada masa akan

---

<sup>13</sup> Ibid hlm19

datang yang akan mengurangi beban pajak, sehingga dapat diakui sebagai suatu aktiva pajak tangguhan.

Pembayaran pajak yang lebih besar pada masa yang akan datang dianggap sebagai suatu kewajiban. Berdasarkan teori akuntansi, kewajiban didefinisikan sebagai suatu kemungkinan adanya pengorbanan ekonomi pada masa akan datang yang muncul dari kewajiban masa kini suatu entitas untuk menyerahkan aktiva kepada entitas-entitas lain sebagai akibat kejadian masa lalu. Jika beban depresiasi aktiva tetap yang diakui secara fiskal lebih besar daripada beban depresiasi aktiva tetap yang diakui secara komersial, sebagai akibat adanya perbedaan metode penyusutan, maka selisih tersebut akan mengakibatkan adanya pengakuan beban pajak yang lebih besar secara komersial pada masa yang akan datang. Sehingga selisih tersebut akan menghasilkan kewajiban pajak tangguhan.

Secara teknis, pengakuan aktiva dan kewajiban pajak tangguhan dilakukan terhadap rugi fiskal yang masih dapat dikompensasi dan beda waktu (*temporary difference*) antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal yang dikenakan pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Dalam aplikasinya, tarif maksimum pajak penghasilan 30% digunakan karena alasan kepraktisan.

Namun perlu diingat, tidak semua beda temporer dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal. Beban amortisasi *goodwill* adalah beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal sehingga tidak akan menimbulkan

kewajiban pajak tangguhan. Demikian juga halnya dengan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi, diakui sebagai aktiva pajak tangguhan apabila terdapat kemungkinan yang besar laba fiskal tersebut memadai untuk dikompensasi pada masa yang akan datang. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan perpajakan.

#### **2.2.5.4 Efek Perubahan Tarif dan Ketentuan Perpajakan**

Perubahan tarif dan ketentuan pajak penghasilan badan adalah hal yang mungkin terjadi. Perubahan tarif dan ketentuan pajak penghasilan badan kemungkinan besar akan diusulkan pada perubahan undang-undang pajak penghasilan. PSAK No.46 tidak mengatur mengenai efek perubahan tarif dan ketentuan pajak penghasilan badan terhadap aktiva dan kewajiban pajak tangguhan. Namun, mengingat PSAK No.46 bersumber dari IAS No.12, efek perubahan tarif dan ketentuan pajak penghasilan terhadap kewajiban pajak kini harus dilaporkan sebagaimana diharuskan dalam IAS No.12 paragraf 46 dengan ketentuan sebagai berikut :<sup>14</sup>

*"Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods should be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted by the balance sheet date".*

Ketentuan di atas menjelaskan bahwa pajak tahun berjalan harus diukur dengan menggunakan tarif dan ketentuan pajak yang diumumkan sebelum atau pada tanggal neraca. Sementara efek perubahan tarif dan

---

<sup>14</sup> Ibid 22

ketentuan pajak penghasilan terhadap aktiva dan kewajiban pajak tangguh-an dilaporkan sebagaimana ditetapkan dalam IAS No.12 paragraf 47 dengan ketentuan sebagai berikut:

*"Deferred tax assets and liabilities should be measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date".*

Ketentuan di atas menjelaskan bahwa aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan diterapkan pada periode dimana aktiva pajak tangguhan tersebut direalisasi atau kewajiban pajak tangguhan tersebut diselesaikan.

#### **2.2.5.5 Pengungkapan pada Laporan Keuangan**

IAS No.12 mengharuskan aktiva dan kewajiban pajak tangguhan disajikan secara bersih pada neraca jika aktiva dan kewajiban tersebut berasal dari unsur aktiva dan kewajiban pajak yang dapat saling mengurangi. Aktiva pajak tangguhan yang berasal dari rugi fiskal yang dapat dikompensasi dapat disajikan bersih dengan kewajiban pajak tangguhan yang berasal dari beda temporer akumulasi depresiasi aktiva tetap. Hal ini tidak diatur dalam PSAK No.46, sehingga timbul keraguan apakah aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan disajikan terpisah atau saling mengurangi. Dalam hal ini, seharusnya PSAK No.46 mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh IAS No.12.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Ibid hlm26

Aktiva pajak tangguhan harus disajikan setelah dikurangi dengan penyisihan terhadap nilai aktiva pajak tangguhan seperti yang disinggung sebelumnya. Ada beberapa unsur perpajakan yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan berdasarkan PSAK No.46. Secara garis besar, unsur-unsur tersebut adalah:

- a. Beban pajak kini, beban pajak tangguhan dan manfaat pajak tangguhan
- b. Jumlah beban pajak kini dan tangguhan yang langsung dibebankan ke ekuitas
- c. Perhitungan pajak kini
- d. Rekonsiliasi fiskal
- e. Aktiva dan kewajiban pajak tangguhan beserta rinciannya

Aktiva pajak tangguhan adalah kemungkinan manfaat ekonomi yang akan diperoleh pada masa yang akan datang. Oleh sebab itu, bisa saja manfaat ekonomi yang dimaksud ternyata tidak dapat diperoleh sehingga setiap tahun harus dilakukan penilaian kembali aktiva pajak tangguhan. Jika terdapat kemungkinan suatu aktiva pajak tangguhan tidak mungkin dapat direalisasi, maka dilakukan penyisihan (*allowance*) terhadap tidak terealisasinya aktiva tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Ibid hlm 28

## 2.3. Manajemen Laba (Earning management)

### 2.3.a Definisi manajemen laba

Merchant 1989:169-169, dikutip oleh Prihat Assih et al<sup>17</sup>, menyatakan bahwa manajemen laba merupakan setiap tindakan manajemen yang dapat mempengaruhi angka laba yang dilaporkan dan manajemen laba merupakan suatu fenomena pelaporan keuangan. Sistem akuntansi akrual memungkinkan manajemen membuat penyesuaian ketika melaporkan angka laba akuntansi. Manajer dapat menggunakan kebijakannya untuk menetapkan waktu dan jumlah dari pendapatan dan biaya yang terjadi dalam perusahaan.

Davidson, Stickney dan Neil (1987) seperti dikutip oleh Schipper (1989)<sup>18</sup> menyatakan bahwa :

*"Managing earnings is the process of taking deliberate steps within the constraints of general accepted accounting principles to bring about a desired level of reported earnings"*

Schipper (1989) mendefinisikan manajemen laba sebagai :

*"... purposeful intervention in the external financial reporting process with the intent of obtaining some private gain, as opposed to, say, merely facilitating in the neutral operation of the process"*

---

<sup>17</sup> Assih, Prihat; Hastuti, Ambar Woro & Parawiyati. Pengaruh Manajemen Laba Pada Nilai Dan Kinerja Perusahaan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Juli-Desember 2005, vol.2No.2 hlm127

<sup>18</sup> Schipper, K., Commentary on Earnings Management, Accounting Horizons, Dec 1989, hlm 91-102

Healy dan Wahlen (1999) mengemukakan bahwa :

” Earnings management occurs when managers use judgment in financial reporting and in the structuring transactions to alter financial reports to either mislead some stakeholders about the underlying economic performance of the company, or to influence contractual outcomes that depend on reported accounting numbers”

Scott (2000)<sup>19</sup> memberikan pengertian tentang manajemen laba yaitu :

”Earnings management is a choice by a manager of accounting policies so as to achieve some specific objective.”

**Alasan (motivasi) yang melatar belakangi manajemen melakukan manajemen laba menurut Scott <sup>20</sup>:**

### **1. Bonus Purposes**

Scott mengutip penelitian yang dilakukan oleh Healy (1985) yang menguji hubungan motivasi kontrak bonus terhadap kinerja manajer. Kesimpulannya manajer menyesuaikan tingkat laba untuk memaksimalkan bonus yang diperolehnya.

### **2. Motivasi Kontrak Lain (Other Contractual Motivations)**

Manajemen laba dilakukan selain motivasi bonus, juga kepentingan lain seperti mendapatkan suku bunga pinjaman yang rendah.

---

<sup>19</sup> Scott, William R., Financial Accounting Theory, third edition. Prentice Hall hlm369

<sup>20</sup> Ibid hlm 369

### **3. Motivasi politik**

Perusahaan-perusahaan yang berskala besar, dalam industri yang strategis, bersifat monopoli yang dapat mempengaruhi kehidupan sebagian besar masyarakat seringkali menjadi target politik. Atas alasan politis ini tendensi perusahaan melakukan manajemen laba untuk dapat memperkecil laba yang dilaporkan.

### **4. Motivasi perpajakan**

Pajak penghasilan menurut Scott mungkin merupakan motif yang paling jelas untuk manajemen laba, yakni memperkecil taxable income untuk memperkecil jumlah pajak yang dibayarkan.

### **5. Motivasi Pergantian Chief Executive Officers (CEO)**

CEO cenderung memilih metode akuntansi yang dapat memperbesar laba dengan tujuan memperoleh bonus yang besar menjelang akhir tahun jabatan mereka dan tidak diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.

### **6. Motivasi Initial Public Offerings (IPO)**

Perusahaan yang akan *IPO* belum memiliki nilai pasar. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana menilai saham perusahaan tersebut. Sehingga laporan keuangan perusahaan yang tercakup dalam prospektus *IPO* digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penilaian nilai pasar. Kondisi ini memberi peluang bagi manajer untuk

melakukan manajemen laba agar mendapat harga yang tertinggi untuk sahamnya.

## **7. Untuk mengkomunikasikan informasi kepada investor**

Walau masih tanda tanya dari segi efficient securities market theory, menurut Scott dengan manajemen laba akan memberi investor informasi yang terbuka (*inside information*), hal ini akan memperbaiki keterbukaan informasi dari laporan keuangan

### **2.3.b Penelitian – penelitian terhadap manajemen laba**

#### **2.3.b.1 Penelitian di luar Indonesia**

Jones (1991) seperti yang dikutip oleh Scott(2000)<sup>21</sup> melakukan penelitian terhadap tindakan perusahaan-perusahaan memperkecil net income yang dilaporkan selama tahun terjadinya import relief investigations oleh International Trade Commission (ITC). Jones menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan cenderung menggunakan discretionary accruals untuk memperkecil jumlah laba yang dilaporkan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terjadi greater income-decreasing accruals pada tahun terjadinya investigasi (1980-1985) oleh ITC, dan lower income-increasing accruals pada tahun setelah investigasi

---

<sup>21</sup> Ibid hlm 281

Penelitian *Sweening (1994)*<sup>22</sup> menguji debt covenant hypothesis menunjukkan perusahaan manufaktur yang default dalam kontrak hutang melakukan perubahan metode akuntansi dengan mengadopsi standar akuntansi yang baru untuk memperbesar laba yang dilaporkan.

*DeFond dan Jiambalvo (1994)* menguji keberadaan manajemen laba pada 94 perusahaan yang melanggar kontrak hutang selama tahun 1985-1988. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam satu tahun sebelum terjadinya pelanggaran kontrak hutang, perusahaan menggunakan/merekayasa "discretionary accruals" untuk memperbesar laba yang dilaporkan.

Penelitian yang dilakukan oleh *Dopuch dan Pincus (1988)*<sup>23</sup> menunjukkan bahwa penghematan pajak lebih besar bagi perusahaan-perusahaan yang menggunakan LIFO dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan FIFO dalam penilaian persediaannya (Scott, 2000:361).

*Phillips, Pincus dan Rego (2003)*<sup>24</sup> menggunakan deferred tax expense (DTE) sebagai proxy perbedaan temporer kena pajak, serta membandingkan DTE dan pengukuran accrual untuk mendeteksi manajemen laba untuk mencegah penurunan laba, mencegah terjadinya rugi dan mencegah negative analyst forecast error. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa DTE memberikan incremental use dibandingkan dengan pengukuran akrual dalam mendeteksi manajemen laba untuk mencegah penurunan laba dan

---

<sup>22</sup> Ibid hlm 279

<sup>23</sup> Dopuch, N. & M.Pincus, Evidence on the Choice of Inventory Accounting Methods:LIFO vs FIFO, Journal of Accounting Research (Spring 1988), hlm 28-59

<sup>24</sup> Phillips, J.,M, Pincus, and S. Rego.2003. Earnings management: New evidence based on deferred tax expense. The Accounting Review 78(2):491-521

mencegah terjadinya rugi, tetapi tidak berlaku untuk mencegah negative forecast analyst error.

Burgstahler & Dichev (1997) melakukan analisis terhadap terpatahnya distribusi laba dan menyimpulkan bahwa terpatahnya distribusi laba dan perubahan laba disebabkan adanya manajemen laba yang dilakukan perusahaan untuk dua tujuan yaitu (1) manajemen laba untuk menghindari pelaporan kerugian dan (2) manajemen laba untuk menghindari penurunan laba.

Penelitian DeAngelo, et.al (1994) menemukan bahwa beberapa CEO kemungkinan melakukan strategi *take a bath* untuk meningkatkan probabilitas terjadinya laba yang positif pada masa yang akan datang (Scott, 2000)

Mengacu artikel Ettredge et al 2004<sup>25</sup>, Beneish 1997: meneliti perbedaan antara perusahaan-perusahaan yang dikelompokkan melakukan fraud dan yang tidak fraud, dengan kondisi kedua kelompok memiliki diskretionari akrual yang besar; hasil temuannya adalah perusahaan dengan diskretionari akrual yang besar melanggar GAAP dan melakukan kecurangan penggelembungan laba, lebih muda dan lebih banyak akrualnya dan nilai sahamnya lebih rendah.

Dechow et al 1996, Richardson et al 2006, mendokumentasikan akrual abnormal yang sangat signifikan dibuat oleh perusahaan yang fraud dibandingkan dengan perusahaan yang tidak fraud.

---

<sup>25</sup> Ettredge, Michael et al, Are High Deferred Tax Levels Associated with Earnings Fraud? May 2007

Rosner 2003: memprediksi dan menemukan bahwa perusahaan yang bangkrut tidak tampak menghadapi kebangkrutan, pendapatan mereka lebih besar yang berasal dari akrual dari perusahaan lainnya. Penelitiannya menyarankan penggunaan akrual diadukan model untuk memprediksi fraud (kecurangan).

Revsine et al. 1999 menyarankan bahwa rasio laba sebelum pajak dibandingkan laba kena pajak dapat digunakan sebagai pengukuran akuntansi konservatif atau agresif.

Penman 2001 : menyimpulkan bahwa perbedaan rasio membantu mendeteksi manipulasi yang material dari biaya, walaupun dia tidak mendalami tetapi menyarankan bahwa perbedaan tersebut dapat mengindikasikan fraud.

Joos et al. 2000 : *argue* bahwa perusahaan dengan perbedaan komersial dan pajak yang besar melakukan manajemen laba, dan investor mengakui masalah ini.

Mills & Newberry 2001, melaporkan konsistensi bukti atas perbedaan komersial-pajak yang besar berhubungan dengan insentif atas laporan keuangan seperti, pola laba, tekanan keuangan dan ambang batas bonus.

Phillips et al 2003, menunjukkan bahwa data pajak tangguhan dapat digunakan untuk mendeteksi manipulasi laba.

Lev & Nissim 2004, menguji apakah perbedaan laba komersial dan pajak dapat digunakan untuk memprediksi pertumbuhan laba yang akan datang

Hanlon 2005 menemukan bahwa perbedaan komersial dan pajak yang besar berhubungan dengan hasil laba yang rendah.

Erickson et al. 2004: menginvestigasi sample dari 27 perusahaan yang dituduh oleh SEC yang mengelembungkan laba. Mereka menemukan bahwa banyak dari perusahaan mau membayar pajak atas laba yang digelembungkan. Perkiraan dari Erickson adalah rata-rata pembayaran pajak ke kantor pajak atas laba yang digelembungkan adalah US\$11,84 milliard yang ekuivalen dengan \$ 0,11 dari US\$ 1 laba sebelum pajak. Kesimpulannya adalah manajer mengakui bahwa tambahan laba \$1 lebih bernilai dari \$0,11 cash yang dibayar.

Badertscher et al. 2006 : fokus meneliti laba yang overstated, menemukan bahwa perlakuan atas overstated tersebut lebih banyak yang tidak diakui sebagai bagian dari laba kena pajak. Jenis perusahaan yang melakukan strategy mengakui overstated sebagai laba kena pajak adalah perusahaan dengan cadangan rugi, perusahaan yang memiliki cash flow yang besar, perusahaan yang menggunakan auditor yang berkualitas, perusahaan yang melakukan fraud lebih cenderung melakukan strategy tersebut.

*Pengujian hubungan dari sejumlah faktor dengan laporan keuangan, seperti:*

Sorenson et al, 1983 : perubahan auditor akan mempengaruhi kualitas dari laba pada laporan keuangan

Loebbecke et al, 1989 : kinerja keuangan yang buruk dan pertumbuhan yang teratur menjadi faktor pengukur kualitas laba.

Beasley 1996: anggota komisaris dari luar perusahaan (independen) yang sedikit menjadi faktor pengukur kualitas laba.

Loebbecke & Willingham 1988, Bell & Carcello 2000 : lingkungan kontrol yang lemah dan sikap manajemen yang aggresive menjadi tolok ukur kualitas laba.

Lee et al 1999 : perbedaan yang besar antara pendapatan dan Cash Flow dari Operasi menjadi faktor pengukur kualitas laba.

Dechow et al. 1996, Beneish 1997, Rosner 2003, Richardson et al. 2006: abnormal accrual menjadi faktor pengukur kualitas laba.

Feroz et al. 1991, Dechow et al. 1996, Summers & Sweeney 198, Rosner 2003 : kenaikan yang tinggi dari piutang, inventory dan akrual menjadi ukuran dari kualitas laba.

### **2.3.b.1 Penelitian di Indonesia**

Tanusdjaja (2006) menguji hubungan antara harga saham, profitabilitas masa depan dan aktivitas manajemen laba perusahaan dengan informasi pajak tangguhan, beserta komponen-komponennya. Hasil penelitiannya pada 163 sample perusahaan publik selama tahun 2000-2003 menemukan bahwa aktiva pajak tangguhan memiliki positif dengan harga saham, delta VA (value allowance) memiliki hubungan dengan laba operasi dan arus kas satu tahun ke depan, serta adanya bukti bahwa perusahaan melakukan manajemen laba dengan menggunakan VA, yaitu untuk memperkecil pelaporan kerugian.

Yulianti – 2004 menguji penggunaan distribusi laba dalam mendeteksi manajemen laba, atas perusahaan yang terdaftar pada JSX selama 1999-2002 menunjukkan ada abnormal distribusi laba dimana perusahaan-perusahaan yang memiliki laba rendah melebihi ekpektasi sedang perusahaan yang menderita rugi yang rendah sebaliknya, sehingga perusahaan di Indonesia melakukan manajemen laba untuk menghindari kerugian.

Yulianti – 2005 menguji kemampuan Beban Pajak Tangguhan Dalam mendeteksi manajemen laba, menemukan bahwa semakin besar akrual dan beban pajak tangguhan maka semakin besar kemungkinan praktek manajemen laba. Tetapi peneliti juga menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba tidak dapat menjelaskan variasi dari beban pajak tangguhan. Sehingga menyarankan perlunya penyempurnaan model penelitian, misalnya dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi besaran beban pajak tangguhan menjadi komponen diskresioner dan non diskresioner

Ika Permatasari – 2005 menguji hubungan manajemen laba dan status keterlambatan perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan menemukan bahwa perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan terlambat menunjukkan rata-rata discretioner akrual yang lebih tinggi dari yang tidak terlambat; dan juga perusahaan yang diaudit oleh big-4 auditor memiliki rata-rata diskretioner akrual yang lebih rendah dari yang lainnya.

Prihat Assih et al. 2005, menguji pengaruh manajemen laba pada nilai dan kinerja perusahaan, dengan rentang waktu sebelum IPO dan setelah IPO, menemukan bahwa manajemen laba dilakukan sebelum IPO

Achmad, Komarudin et al. 2007<sup>26</sup>, melakukan investigasi atas eksistensi (keberadaan) motivasi dan strategi manajemen laba di Indonesia, dengan model regresi ordinary least square menunjukkan bahwa yang mempengaruhi manajemen laba adalah untuk kepentingan pinjaman (kredit) dan biaya politik. Sedang motif bonus dan strategi pilihan metode accounting tidak mempengaruhi manajemen laba.

Pembahasan dan analisis data dalam thesis ini mengupas komponen perusahaan yang terdaftar dalam BEJ dengan tujuan menelusuri secara mendalam aspek diskretionari dan non diskretionari dari perbedaan laba pajak dan laba komersial

### **2.3.c) Metode Manajemen laba**

Menurut Scott (2000) para manajer menerapkan bermacam-macam variasi bentuk manajemen laba. Variasi tersebut dapat diringkas menjadi sebagai berikut :

#### **1. *taking a bath***

Hal ini terjadi pada saat perusahaan berada dalam masa krisis atau pada saat reorganisasi, termasuk pada saat perekrutan CEO baru.

---

<sup>26</sup> Achmad, Komarudin, et al, Investigasi Motivasi dan Strategi Manajemen Laba pada perusahaan publik di Indonesia, Simposium Nasional Akuntansi X, Unhas Makassar 26-28 Juli 2007

Pada saat perusahaan mengalami kerugian (atau net income berada dibawah "bogey" atau dibawah expectasi), manajer akan berusaha untuk menyatakan kerugian tersebut bahkan dapat lebih besar jumlah kerugian yang akan sebenarnya. Hal ini dikarenakan manajer memiliki harapan akan kemungkinan memperoleh bonus di tahun mendatang.

Contoh bentuk *taking a bath*, antara lain write off asset, pengakuan pada tahun berjalan atas biaya-biaya di tahun mendatang untuk tujuan pemerataan, dan juga praktek *clear the decks*. Efek dari *taking a bath* ini akan meletakkan laba dimasa mendatang "*in the bank*"

## **2. income minimization**

Pola ini pada dasarnya mirip dengan pola *taking a bath*, namun *kadarnya lebih lunak (less extreme than taking a bath)*. Pola ini dilakukan pada periode perusahaan mengalami laba yang besar.

Tujuannya adalah untuk "menahan" besarnya jumlah laba yang dilaporkan agar dapat dialokasikan ke tahun berikutnya. Pola ini berkaitan erat dengan pembayaran pajak penghasilan perusahaan, dimana jumlah pembayaran pajak bertambah seiring dengan pertambahan jumlah laba yang dilaporkan.

Contohnya antara lain penghapusan dalam jumlah besar atas capital & intangible assets, membebankan secara langsung pengeluaran untuk R&D, serta penerapan LIFO dalam penilaian persediaan.

## **3. income maximization**

Manajer melakukan penggelembungan laba yang dilaporkan untuk tujuan mendapatkan bonus yang besar. Hal ini juga dilakukan oleh perusahaan

yang memiliki masalah dengan jaminan hutang. Contohnya dengan pencatatan pendapatan secara accruals basis dan pengakuan biaya secara cash basis.

#### **4. income smoothing**

Bentuk manajemen laba ini merupakan yang paling menarik. Mengacu Healy (1985), manajer memiliki insentif untuk melakukan income smoothing, sehingga jumlah laba yang dilaporkan selalu berada di dalam daerah antara bogey dan cap dengan tujuan pencapaian bonus.

Apabila manajer cenderung bersifat risk-averse, maka ia akan lebih suka "menahan" besarnya bonus yang akan diperoleh dengan "menahan" laba yang akan dilaporkan.

Income smoothing juga dilakukan oleh manajer, menurunkan kemungkinan dipecah dengan menghasilkan laba sesuai dengan harapan. Selain itu perusahaan men"smooth" laporan laba bersihnya untuk keperluan eksternal.

Healy (1985) meneliti 2 pendekatan dalam melakukan manajemen laba :

1) mengontrol (mengatur) berbagai macam akrual (*seperti : amortisasi expenses, increase in net account receivable, increase in inventory, decrease in accounts payable and accrual liabilities*). 2) merubah kebijakan akunting

**Beberapa Praktek manajemen laba<sup>27</sup>** meliputi fleksibilitas prinsip akuntansi, pelanggaran prinsip akuntansi, dan manajemen laba transaksional. Penjelasan sebagai berikut :

---

<sup>27</sup> Achmad, Komaruddin et al, Ibid

a. strategi fleksibilitas prinsip akuntansi. meliputi (1) estimasi penyisihan piutang menimbulkan beban penyisihan piutang (konsisten dengan Beneish 1997 dan Dechow et al. 1995), (2) estimasi penyisihan persediaan menimbulkan beban penyisihan persediaan (konsisten dengan Beneish 1997), (3) estimasi umur aktiva atau tarip penyusutan menimbulkan beban penyusutan (konsisten dengan Neil et al. 1995 dan Michelson et al. 1995), dan (4) estimasi masa manfaat biaya tangguhan menimbulkan beban amortisasi biaya tangguhan (konsisten dengan Beneish 1997 dan Moses 1987). Perusahaan memiliki kebebasan untuk memperoleh keyakinan mengenai kewajaran

b. pelanggaran prinsip akuntansi, meliputi (1) tidak mencatat persediaan dalam proses untuk meningkatkan harga pokok penjualan, (2) tidak mencatat laba penjualan aktiva tetap (konsisten dengan Bartov 1993), (3) tidak mencatat kerugian penurunan nilai aktiva non operasi (konsisten dengan Copeland 1968, Schiff 1968, dan Kirchheimer 1968), (4) menggunakan nilai neto persediaan, setelah dikurangi penyisihannya, untuk menaikkan harga pokok penjualan, (5) mencatat investasi kepemilikan saham sebesar 20% (lebih) dengan metode biaya (konsisten dengan Barefield & Comiskey 1972 dan Dascher & Malcolm 1970), (6) melaporkan goodwill negatif (selisih lebih nilai buku atas biaya perolehan investasi anak perusahaan) dengan masa amortisasi 20 tahun untuk menurunkan beban amortisasi; dalam hal ini, goodwill negatif seharusnya mengurangi biaya perolehan aktiva non lancar, (7) mencatat persediaan fiktif (konsisten dengan

Beneish 1997); dalam hal ini, mencatat persediaan sebesar biaya upah, dan (8) membuat laporan menyesatkan tentang kerugian kehilangan persediaan, dengan tidak mengestimasi pendapatan dari klaim asuransi yang mengurangi kerugian. Kesalahan perhitungan harga pokok penjualan, pelaporan goodwill negatif, dan penyesatan pelaporan kerugian kehilangan persediaan merupakan strategi manajemen laba yang berlaku spesifik (bernilai lokal) dan belum teridentifikasi dalam penelitian terdahulu.

c. strategi manajemen laba transaksional. Strategi ini meliputi (1) kerugian selisih kurs akibat pembelian impor dalam valuta asing (konsisten dengan Brayshawand & Eldin 1989), (2) akuisisi perusahaan lain yang profitable atau divestasi anak perusahaan yang menderita kerugian (konsisten dengan Beneish 1999), (3) pencatatan pendapatan dan harga pokok penjualan fiktif dalam pengakuan pendapatan komisi sebagai perantara penjualan, (4) penyesatan pelaporan transaksi antar perusahaan atau antar pihak dalam hubungan istimewa; dalam hal ini, bentuk-bentuk transaksinya antara lain (a) membuat perjanjian pengalihan aktiva di masa depan dan bersifat kontinjensi untuk mengakui keuntungan atau kerugian saat menjelang akhir tahun (konsisten dengan Givoly & Ronen 1981), (b) bertransaksi dengan perusahaan non publik yang terindikasi sebagai perusahaan afiliasi dalam pengendalian holding company (konsisten dengan Beneish 1997, Carlson & Bathala 1997, serta Beattie et al. 1994), (c) bertransaksi penjualan dan pembelian, berutang dan berpiutang, serta menyewa dan menyewakan ruang dengan perusahaan lain yang terindikasi

sebagai perusahaan afiliasi dalam pengendalian holding company (mengindikasikan substansi ekonomi riil sebagai satu kesatuan entitas usaha).

Menurut *DeFond dan Park (1997)* para manajer menggunakan discretionary accruals untuk menggeser laba dari tahun mendatang apabila laba masa yang akan datang diharapkan lebih baik daripada laba tahun berjalan. Demikian pula apabila laba tahun yang akan datang diprediksi mengalami penurunan, maka para manajer akan "menyimpan" laba tahun berjalan. Kondisi tersebut dilakukan para manajer agar mereka tidak dipecat apabila jumlah laba tahun berjalan yang dilaporkan lebih rendah dibandingkan laba tahu sebelumnya.

#### **2.3.d Pengukuran Manajemen laba**

Penelitian mengenai manajemen laba untuk mencari model yang terbaik secara statistik dalam mendeteksi manajemen laba. Pada umumnya proxy yang digunakan untuk manajemen laba adalah melalui pengukuran discretionary accruals.

*Dechow, et.al (1995)* membandingkan beberapa model yang dapat digunakan untuk mengukur discretionary accruals dan menyimpulkan bahwa modified jones model merupakan model yang terbaik dalam mendeteksi manajemen laba.

Study yang dilakukan oleh *Phillips, et.al (2003)* menunjukkan bahwa DTE memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendeteksi manajemen

laba untuk mencegah penurunan laba dan mencegah terjadinya rugi dibandingkan dengan pengukuran discretionary accruals yang dilakukan dengan menggunakan Modified Jones Model. Dalam hal ini DTE menunjukkan hubungan yang lebih significant dibandingkan dengan Modified Jones Model dalam mendeteksi manajemen laba.

Study ini mereplikasi studi yang dilakukan oleh *Phillips, et.al (2003)* yang membandingkan DTE dan pengukuran accruals dengan menggunakan Modified Jones Model untuk mendeteksi manajemen laba.

#### **2.3.d.1 Penggunaan Distribusi laba dalam memprediksi manajemen laba**

Pendekatan distribusi laba dapat dilakukan untuk mendeteksi perilaku manajemen laba yang dilakukan oleh manajer. Pendekatan distribusi laba mengidentifikasi batas pelaporan laba yang manajer harapkan untuk dipenuhi. Burgstahler & Dichev (1997) menyatakan bahwa distribusi laba dan perubahan laba terpatah di sekitar batas pelaporan (earnings treshold) atau titik nol dalam distribusi pendapatan yang seharusnya mengikuti distribusi normal (smooths)

Terpatahnya distribusi laba di sekitra titik laba sama dengan nol disebabkan karena terlalu sedikit perusahaan yang melaporkan kerugian dalam jumlah kecil (small loss firms) dibandingkan dengan perusahaan yang melaporkan keuntungan dalam jumlah kecil (small profit firms)

Terpatahnya distribusi disekitar titik nol juga terjadi dalam distribusi perubahan laba yang disebabkan karena terlalu sedikit perusahaan yang melaporkan penurunan laba yang kecil (small decrease firms) dibandingkan dengan perusahaan yang melaporkan peningkatan laba dalam jumlah kecil (small increase firms).

#### **2.3.d.2 Pengukuran manajemen laba dengan diskresioneri akrual**

Model Jones membedakan total akrual menjadi akrual diskresi (DAC) dan akrual non diskresi (NDA). Selisih antara TACC dan NDA adalah DAC yang sering digunakan sebagai proxy manajemen laba dalam penelitian mengenai manajemen laba.

Phillips, et.al (2003) menggunakan istilah Abnormal Accruals sebagai pengganti DAC dan Normal Accruals sebagai pengganti NDA. Model ini digunakan untuk mengeliminasi error dalam mengukur DAC yang menggunakan perubahan atas revenue (REV) sehingga dilakukan adjustment yaitu perubahan atas REV pada tahun tertentu di -adjust terhadap perubahan dalam piutang (REC) pada tahun yang sama.

Asumsi yang digunakan bahwa semua perubahan pada penjualan kredit pada suatu tahun dapat menimbulkan manajemen laba pada tahun yang sama. Hal tersebut dikarenakan manajer/perusahaan lebih mudah melakukan manajemen laba melalui kebijakan atas pengukuran pendapatan pada penjualan kredit dibandingkan dengan melakukan manajemen laba melalui kebijakan atas pengukuran pendapatan pada penjualan tunai.

Discretionary accruals (DAC) merupakan proxy bagi manajemen laba. Semakin tinggi DAC menunjukkan bahwa terdapat wewenang yang besar oleh manajer untuk melakukan akrual terhadap item-item dalam laporan laba-rugi yang tidak tercerminkan dalam laporan arus kas. Semakin besar akrual yang bersifat discretionary maka semakin besar peluang bagi manajer untuk melakukan manajemen laba.

### **2.3.d.3 Pengukuran manajemen laba dengan DTE**

Mengacu pada penelitian PPR-2003, new evidence based on Deferred Tax Expense<sup>x</sup>, meneliti kegunaan pajak tangguhan dalam 3 target laba sebagai berikut :

- (1) Manajemen laba untuk mencegah terjadinya penurunan laba (EM1)
- (2) Manajemen laba untuk mencegah terjadinya rugi (EM2)
- (3) Manajemen laba untuk mencapai ramalan atau analisa prospek dari analisis ekonomi. (EM3)

#### *Implementasi manajemen laba untuk mencegah terjadinya rugi (EM1)*

1. Apabila laba perusahaan  $i$  pada tahun  $(t)$  dibagi dengan market value of equity pada akhir tahun  $(t-1)$  adalah lebih besar atau sama dengan nol, maka perusahaan  $i$  dianggap melakukan manajemen laba lebih tinggi dari
2. Apabila laba perusahaan  $i$  pada tahun  $(t)$  dibagi dengan market value of equity pada akhir tahun  $(t-1)$  berada dalam daerah lebih kecil dari nol.

### *Implementasi manajemen laba untuk mencegah penurunan laba (EM2)*

1. Apabila perubahan atau selisih antara laba perusahaan  $i$  pada tahun  $(t-1)$  ke tahun  $(t)$  dibagi dengan market value of equity pada akhir tahun  $(t-2)$  adalah lebih besar atau sama dengan nol, maka perusahaan  $i$  dianggap melakukan manajemen laba lebih tinggi dari
2. Apabila laba perusahaan  $i$  pada tahun  $(t-1)$  ke tahun  $(t)$  dibagi dengan market value of equity pada akhir tahun  $(t-2)$  berada dalam daerah lebih kecil dari nol.

*Hal ini juga berlaku untuk manajemen laba untuk mencapai ramalan dari analisis keuangan.*

### **Mengacu penelitian PPR-2003,**

1. Untuk penelitian EM1, range  $-0,01$  (small decrease firms) dan  $0,01$  (small increase firms) untuk distribusi perubahan laba
2. Untuk penelitian EM2, range  $-0,02$  (small loss firms) dan  $0,02$  (small profit firms) untuk distribusi laba,

### **2.3.d.4 Pengukuran Manajemen laba dengan komponen DTL**

Phillips, John et al, melakukan penelitian atas komponen account dari deferred tax liability untuk mendeteksi manajemen laba.

Penelitian atas type account, dibagi dalam 3 kategori sebagai berikut :

#### **Kategori 1**

Book-tax basis differences resulting from :

- (1) revenue and expense accruals and reserves,**

changes in net DTLs relating to accruals and reserves for bad debt expense, warranties, restructuring charges, and other deferred revenue and expense items that result in future tax deductions or future taxable income.

**(2) compensation,**

changes in net DTLs arising from book-tax differences related to compensation: pensions, deferred compensation, employee benefit plans, and other post-employment benefits

**(3) depreciation of tangible assets,**

changes in the net DTLs associated with different book and tax bases due to different depreciation methods for book and tax purposes

**(4) other asset valuation**

e.g., expenses related to intangible assets, inventory, and leases), and changes in net DTLs resulting from other book-tax asset basis differences such as those relating to intangibles, natural resources, inventory, lease obligations, and acquired in-process research and development costs

**(5) miscellaneous items.**

changes in all other net DTLs, except those related to tax carryforwards, unrealized gains and losses, and the VAA (valuation allowance account)

*Manajemen memiliki diskretoneri untuk menentukan kebijakan kategori 1 ini*

**Kategori 2**

(1) income tax (loss) carryforwards,

changes in net DTLs due to net operating losses, alternative minimum tax credits, and other tax credit carryforwards and

(2) unrealized gains and losses on securities.

change in net DTLs related to unrealized gains and losses on investments

*manajemen tidak memiliki diskretioneri untuk menentukan kebijakan kategori*

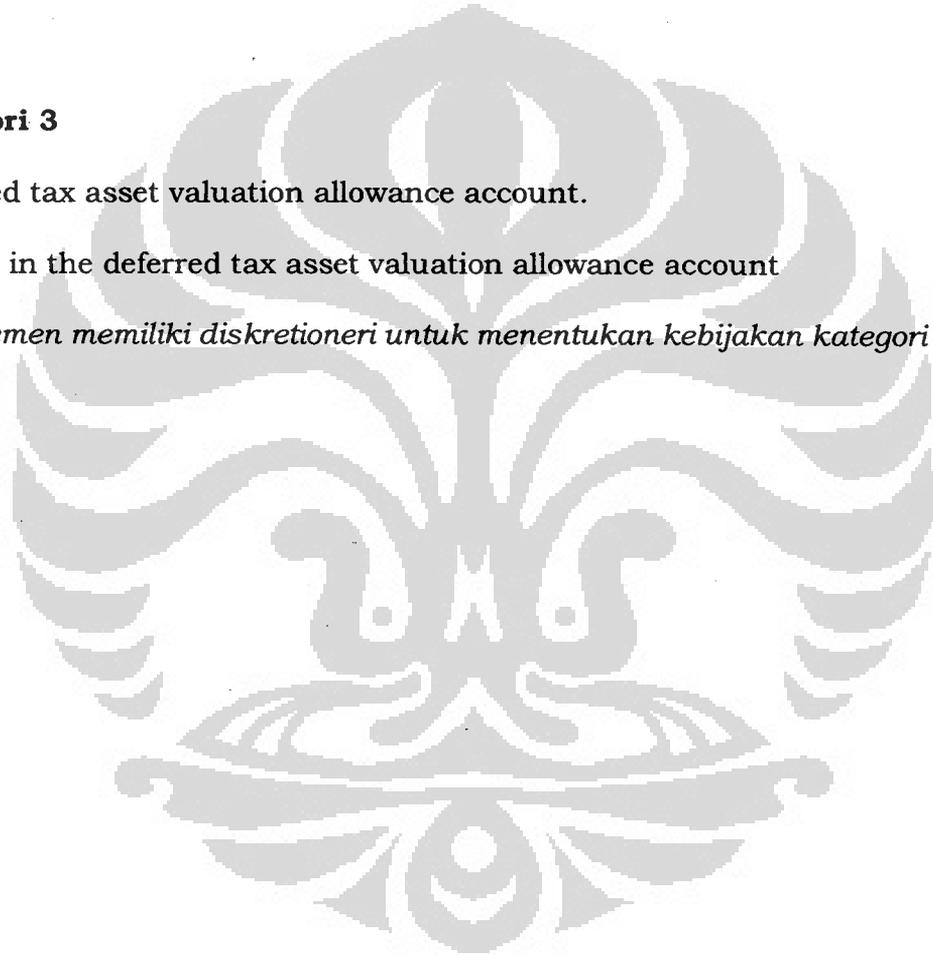
2

### **Kategori 3**

Deferred tax asset valuation allowance account.

change in the deferred tax asset valuation allowance account

*manajemen memiliki diskretioneri untuk menentukan kebijakan kategori 3*



## Bab III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan enam aspek desain penelitian:<sup>1</sup> tujuan, tipe, keterlibatan penulis, setting, unit analisa dan horison waktu.

##### 3.1.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini merupakan *applied research*<sup>2</sup>, dan tujuan penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menguraikan dan menganalisis laporan keuangan dengan menggunakan rasio Beban/Pendapatan Pajak Tangguhan (DTE/DTI) dan total asset dan mempelajari hubungan atau korelasi antar variable pajak tangguhan dan implementasinya oleh perusahaan di Indonesia berdasarkan acuan dari penelitian bahwa level pajak tangguhan (DTE) mencerminkan *earning management*

##### 3.1.2 Tipe dari penelitian

Tipe penelitian merupakan *correlational study*, yang menguji apakah kesimpulan dari peneliti terdahulu<sup>3</sup>, dari elemen-elemen dasar.

---

<sup>1</sup> Uma Sekaran. *Research Methods For Business : A Skill Building Approach*. Edisi 4. New York: John Wiley & Sons, 2003, hal 116-138

<sup>2</sup> ibid

<sup>3</sup> Ibid, hal 252-253

### **3.1.3 Keterlibatan penulis dengan penelitian**

Penelitian menggunakan minimal interfeere, karena penulis mengambil data-data sekunder yang diambil dari Pusat Referensi Pasar Modal di BEJ.

### **3.1.4 Setting Penelitian**

Penelitian merupakan *field study*, dimana data DTE, Total asset perusahaan dan komponen-komponennya di uji hubungannya. Penelitian dilakukan dengan *noncontrived setting*, karena pada saat penelitian dilakukan, aktivitas obyek penelitian tetap berlangsung normal.

### **3.1.5 Unit analisa: organizations**

objek penelitian terhadap seluruh perusahaan yang terdaftar (285 perusahaan) dalam BEJ yang dipublikasikan dalam media Kompas dan Bisnis Indonesia.

### **3.1.6 Horizon Waktu**

Penelitian secara cross-sectional, karena data yang digunakan berasal dari satu periode yaitu data tahun 2006

## **3.2 Tehnik Pengumpulan data**

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *structured observational*<sup>4</sup>, karena data yang menjadi fokus penelitian adalah

data laporan keuangan perusahaan go public yang diambil dari Pusat Referensi Pasar Modal di BEJ

### 3.3 Obyek Penelitian

Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, dengan criteria sebagai berikut :

1. Perusahaan terdata pada harian Kompas dan Bisnis Indonesia
2. Data tersedia dipublikasikan melalui JSX
3. Laba Sebelum Pajak (Earning Before Tax) tidak minus (rugi)

### 3.4 Definisi Variable Penelitian

Variable penelitian yang digunakan sebagai berikut :

1. DTE/I (deferred tax expense/income)

$$DTE/I = \Delta DTA +/- \Delta DTL$$

Data merupakan komponen Profit & Loss tahun 2006

2. Total Asset

$$TA = (TA_{2005} + TA_{2006})/2$$

Data merupakan komponen neraca tahun 2005 dan 2006

3. rasio DTE

$$\text{Rasio DTE} = DTE / TA$$

4. DTA (deferred tax asset/aktiva pajak tangguhan)

Data merupakan komponen neraca

5. DTL (deferred tax liability/kewajiban pajak tangguhan)

Data merupakan komponen neraca

## 6. Elemen-elemen DTE/I

Elemen detail DTE/I yang diteliti, data dalam laporan keuangan umumnya dapat dilihat pada catatan laporan keuangan.

### 3.5 Keterbatasan Data Penelitian

Pengambilan data 45 perusahaan dengan tax gap 0,003 mengacu penelitian pada Ettredge, yang menemukan bahwa perusahaan yang terindikasi fraud di Amerika memiliki tax gap 0,003, dan perusahaan yang tidak fraud dipilih perusahaan dengan kategori yang sejenis dalam besarnya aset dan sektor (minus 0,002).

Untuk thesis ini, data perusahaan yang fraud tidak diperoleh sebagai pengganti digunakan data perusahaan dengan tax gap yang sama dengan hasil penelitian Ettredge yakni 0,003. Untuk penelitian 45 perusahaan tandingan atas tax gap 0,003 tidak berdasarkan besarnya aset dan sektor karena keterbatasan data, sehingga tax gap (minus 0,002 dan lebih kecil) diambil sebagai data pembanding.

## Bab IV

### PEMBAHASAN DAN ANALISIS

#### 4.1 GAMBARAN DATA YANG DITELITI

##### 4.1.1 Komposisi data

Penelitian terhadap seluruh data DTE yang ada di harian Kompas & Bisnis

Populasi data BEJ : 344 perusahaan

Data BEJ per tgl 8 November 2007 : 285 perusahaan

Tidak ada data (publikasi JSX) : 15 perusahaan

Data yang diteliti laporan keuangannya : 270 perusahaan

Status laporan keuangan rugi : 65 perusahaan

Data yang ada dan tidak rugi : 205 perusahaan

Dari 206 sampel perusahaan, 3 perusahaan tidak sesuai dengan rumusan PSAK 46 dan 7 perusahaan tidak mencerminkan penerapan PSAK 46

Perusahaan keuangan, perbankan tidak diambil menjadi sampel karena memiliki perbedaan format dan model laporan, sehingga kurang relevan jika diperbandingkan.

Penelitian perusahaan dengan Tax Gap<sup>1</sup>:

DTE lebih dari 0,003 : 45 perusahaan diperbandingkan dengan

DTE/(DTI) minus 0,002 : 45 perusahaan<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Istilah Tax Gap adalah perbedaan laba komersial dan laba pajak yang diperbandingkan dengan rata-rata total aset perusahaan 2 tahun (tahun 2005 dan 2006)

#### 4.1.2 Data yang tidak menerapkan PSAK 46

Tidak sesuai dengan rumusan PSAK 46 artinya, komposisi<sup>3</sup> DTE, dimana disebutkan bahwa kenaikan (penurunan) dalam net DTL akan mengakibatkan DTE (benefit), tetapi bisa terjadi perbedaan jika perusahaan melakukan mergers, acquisition, divestitures (peleburan)

DTE atau (DTI) = Perubahan DTA +/- Perubahan DTL

**Jurnal umum yang timbul sebagai berikut :**

Debet :	DTE	xxx
Credit :	DTL	xxx
Atau		
Debet :	DTA	xxx
Credit :	DTI	xxx

##### 4.1.2.1 Perusahaan dengan laporan keuangan yang tidak memiliki account DTA, DTL ataupun DTE

Dari analisa terhadap 206 perusahaan terdapat 3 perusahaan tidak menerapkan PSAK 46, sebagai berikut :

#### DART

Perubahan	th 2006	th 2005
-----------	---------	---------

<sup>2</sup> Pemilihan DTE/DTI minus 0,002 sebanyak 45 perusahaan diambil berurutan dimulai perusahaan dengan DTE/I minus 0,002 dan seterusnya. Alasan pemilihan ini adalah kepraktisan semata, karena jika perbandingan menggunakan perusahaan dengan total asset yang sama dan subsektor yang sama akan menemui keterbatasan data. Dasar pertimbangan untuk membandingkan 45 perusahaan yang ber "tax gap" tinggi (0,003) dengan 45 perusahaan ber "tax gap" rendah (-0,002) mengacu pada penelitian Ettredge et al yang membandingkan 65 perusahaan fraud dan 65 perusahaan yang non fraud dengan skala dan sektor yang sama.

<sup>3</sup> Phillips, John et al, Decomposing Changes in Deferred Tax Assets and Liabilities to Isolate Earnings Management Activities, 2003, hlm 6

DTA	(1.604)	-	1.604
DTL	-	-	-
Total perubahan DTE/(DTI)	(1.604)	-	
Perbedaan	<u>(1.604)</u>		

**Penjelasan :**

Perusahaan adalah perusahaan real estate/pembangunan, sewa, parkir  
Perusahaan tidak menerapkan PSAK 46 untuk perhitungan deferred tax-nya di tahun 2006

Perubahan saldo DTA tahun 2005 sebesar 1,6 milyar menjadi nol, tidak diungkapkan dalam laporan keuangan (tidak ada disclosure)

Perusahaan mengakui adanya beban pajak penghasilan final sebesar Rp.21.631 milyar, Dari komponen penghasilan terlihat tidak hanya mencakup penghasilan atas obyek pajak final, tetapi juga mencakup obyek pajak tidak final, seperti Jasa pemeliharaan dan juga pendapatan lain-lain

Kesimpulan : ada asset yang hilang

**BLTA**

	Perubahan	th 2006	th 2005
DTA	-	-	-
DTL	-	-	-
Total perubahan DTE/DTI	-	-	-
Perbedaan	<u>-</u>		

**Penjelasan :**

Perusahaan adalah perusahaan pelayaran

Pada kebijakan akuntansi dijelaskan bahwa perusahaan menerapkan PSAK 46, tetapi Tidak ada perbedaan temporer yang berhubungan dengan pendapatan tidak final

Tidak ada disclosure terhadap pendapatan tidak final yang tidak berbeda pengakuannya antara pajak dan komersial

Apakah hal ini sesuai PSAK 46?

**LPLI**

	Perubahan	th 2006	th 2005
DTA	-	-	-
DTL	-	-	-
Total perubahan DTE/DTI	-	-	-
Perbedaan	<u>-</u>		

**Penjelasan :**

Perusahaan adalah perusahaan jasa teknologi informasi termasuk internet  
Pada kebijakan akuntansi dijelaskan bahwa perusahaan menerapkan PSAK 46, tetapi  
Tidak ada perbedaan temporer yang berhubungan dengan pendapatan tidak  
final

Tidak ada disclosure terhadap pendapatan tidak final yang tidak berbeda pengakuannya  
antara pajak dan komersial

Apakah hal ini sesuai PSAK 46?

## Analisa

Dari 3 perusahaan diatas komponen Pajak Tangguhan, bermanfaat  
memberikan indikasi adanya hal yang belum diungkap dalam laporan  
keuangan seperti :

Pada DART, DTA sejumlah Rp. 1, 6 milyar yang ada di tahun 2005  
tidak tampak dalam komponen pajak tangguhan lainnya (DTL atau DTE) di  
tahun 2006, artinya ada asset hilang senilai 1,6 mily/[ $(1.497\text{mily} + 1.402\text{mily})/2$ ] = 0,1% dari average total asset 2006-2005

Mengacu pada Phillips at al<sup>4</sup>, SFAS No.109 mengharuskan  
pengungkapan jenis (tipe) dan jumlah perbedaan temporer yang signifikan  
setiap perubahan DTA dan DTL, pertanyaan berikutnya adalah apakah 0,1%  
perubahan DTA ini cukup signifikan atau tidak signifikan? Sampai saat ini  
issue materialitas atau signifikansi dari suatu obyek tidak sepenuhnya jelas,  
karena sangat tergantung pada Kantor Akuntan Publik yang memeriksa  
perusahaan apakah akan menganggap hal ini material atau tidak.

Untuk 2(dua) perusahaan lainnya, BLTA yang merupakan perusahaan  
pelayaran dan LPLI yang merupakan perusahaan jasa teknologi informasi

---

<sup>4</sup> Ibid, hlm 7

termasuk internet, pada PSAK 46 par 50 disebutkan Apabila nilai tercatat aktiva atau kewajiban yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari DPP-nya maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aktiva atau kewajiban pajak tangguhan.

Jika 2(dua) perusahaan ini diasumsikan sudah benar dalam menerapkan PSAK 46 dengan tidak membukukan perbedaan temporer sebagai DTA ataupun DTL, berarti ada perusahaan dengan sektor yang sejenis perlu mendapat perhatian mengapa dapat membukukan DTA dan DTL.

**4.1.2.2 Perusahaan dengan laporan keuangan yang memiliki account DTA, DTL ataupun DTE tetapi tidak mengikuti formula ataupun rumusan DTE atau (DTI) = Perubahan DTA +/- Perubahan DTL**

<u>UNIC</u>	USD		
	Perubahan	th 2006	th 2005
DTA	(1.664.342)	2.189.723	525.381
DTL	(237.673)	8.779.158	9.016.831
Total perubahan	(1.902.015)		
DTE/(DTI)	<u>(1.096.798)</u>		
Perbedaan	<u><u>(805.217)</u></u>		

**penjelasan :**

Ruang lingkup kegiatan perusahaan mencakup industri bahan kimia, jasa angkutan darat, penampungan barang impor, konstruksi real estate, penyewaan ruang perkantoran  
 pengakuan adanya deferred tax income di laporan laba rugi sebesar USD1.097 ribu tidak sesuai dengan kenaikan asset dan penurunan liabilitynya yang sebesar Rp.1,902 milyar

**KLBF**

	Perubahan	th 2006	th 2005
DTA	(15.158)	23.167	8.009
DTL	(1.212)	10.771	11.983
total perubahan	(16.370)		
DTE/(DTI)	<u>(14.512)</u>		
perbedaan	<u>(1.858)</u>		

**penjelasan**

ruang lingkup kegiatan perusahaan bidang industri dan distribusi produk farmasi pengakuan adanya deferred tax income di laporan laba rugi sebesar Rp.14,5 milyar tidak sesuai dengan kenaikan asset dan penurunan liabilitynya yang sebesar Rp.16,4 milyar

**MASA**

	Perubahan	th 2006	th 2005
DTA	1.125	-	1.125
DTL	3.837	3.837	-
total perubahan	4.962		
DTE/(DTI)	<u>(42.702)</u>		
perbedaan	<u>47.664</u>		

**penjelasan**

perusahaan bergerak dalam bidang industri pembuatan ban luar kendaraan bermotor roda empat atau lebih pengakuan adanya deferred tax income di laporan laba rugi sebesar Rp.42,7 milyar tidak sesuai dengan penurunan asset dan kenaikan liabilitynya yang sebesar Rp.(4,9 milyar)

**MEDC**

	in USD		
	Perubahan	th 2006	th 2005
DTA	(23.401.640)	56.884.730	33.483.090
DTL	12.690.765	123.517.995	110.827.230
total perubahan	(10.710.875)		
DTE/DTI	<u>5.318.897</u>		
perbedaan	<u>(16.029.772)</u>		

**penjelasan**

Perusahaan bergerak dibidang explorasi dan produksi minyak gas bumi, metanol pengakuan adanya deferred tax income di laporan laba rugi sebesar Rp.42,7 milyar tidak sesuai dengan penurunan asset dan kenaikan liabilitynya yang sebesar Rp.(4,9 milyar)

<b><u>BNBR</u></b>	in juta Rp		
	Perubahan	th 2006	th 2005
DTA	(3.639)	166.105	162.466
DTL	29.923	180.020	150.097
total			
perubahan	26.284		
DTE/(DTI)	<u>27.590</u>		
perbedaan	<u>(1.306)</u>		

**penjelasan**

Perusahaan bergerak di beberapa bidang, seperti minyak, transportasi, telekomunikasi dst pengakuan adanya deferred tax expense di laporan laba rugi sebesar Rp. 27,6 milyar tidak sesuai dengan penurunan asset dan kenaikan liabilitasnya yang sebesar Rp.(26,3 milyar)

<b><u>MAPI</u></b>	in juta Rp		
	Perubahan	th 2006	th 2005
DTA	5.403	7.973	13.376
DTL	7.007	17.369	10.362
total			
perubahan	12.410		
DTE/(DTI)	<u>12.319</u>		
perbedaan	<u>91</u>		

**penjelasan**

Perusahaan bergerak di beberapa bidang, seperti minyak, transportasi, telekomunikasi dst pengakuan adanya deferred tax expense di laporan laba rugi sebesar Rp. 12,3 milyar tidak sesuai dengan penurunan asset dan kenaikan liabilitasnya yang sebesar Rp.(12,4 milyar)

<b><u>ULTJ</u></b>	in juta Rp		
	Perubahan	th 2006	th 2005
DTA	4.037	-	4.037
DTL	7.089	7.089	-
total			
perubahan	11.126		
DTE/(DTI)	<u>11.209</u>		
perbedaan	<u>(83)</u>		

**penjelasan**

Perusahaan bergerak di beberapa bidang, seperti minyak, transportasi, telekomunikasi dst pengakuan adanya deferred tax expense di laporan laba rugi sebesar Rp. 11,2 milyar tidak sesuai dengan penurunan asset dan kenaikan liabilitasnya yang sebesar Rp.(11,1 milyar)

### **Analisa :**

Mengacu Halim, Yusuf<sup>5</sup>, mengenai direct charge or credit to equity, terhadap transaksi tertentu, pembebanan atau pengkreditannya tidak dilakukan ke laba-rugi tetapi langsung ke ekuitas, seperti selisih penialian kembali aktiva tetap, penyesuaian saldo laba awal periode (sebagai akibat koreksi kesalahan mendasar, perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan secara retrospektif, dsb), selisih kurs penjabaran laporan keuangan dan sebagainya. Karena langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas, maka apabila ada "current tax" dan "deferred tax" yang terkait harus dikreditkan atau dibebankan ke ekuitas.

Dengan formula DTE dapat diketahui apakah laporan keuangan perusahaan mengikuti rumusan atau tidak. Jika jawaban ya dapat dilakukan analisa atas komponen pajak tangguhannya, jika tidak mengikuti formula DTE, ada beberapa kemungkinan yakni :

- ada koreksi ke ekuitas, sesuai acuan Yusuf Halim
- merujuk point 4.1.2.1; kesalahan immaterial (tidak melampaui batas materialitas – standar KAP yang bersangkutan) sehingga diabaikan oleh KAP

Kesimpulan dari point formula ini adalah bahwa DTE dapat dijadikan salah satu indikator bagi pembaca laporan keuangan apakah laporan keuangan sudah melewati salah perhitungan atau pun salah saji atau "sudah balance"

---

<sup>5</sup> Halim, Yusuf, Akuntansi Pajak Penghasilan, Aplikasi dan contoh penerapan PSAK 46: Ikatan Akuntan Indonesia, 2003 hal 4

sehingga dapat diperoleh gambaran apakah laporan keuangan tersebut reliable atau dapat menyebabkan *misleading*. Lebih lanjut jika memang selisih dari formula DTE tersebut dikoreksi ke ekuitas, hal ini harus mendapat perhatian khusus bagi pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan perusahaan apakah koreksi ini suatu hal yang wajar dan semata-mata penyesuaian akibat aktivitas bisnis atau usaha biasa, atau ada hal-hal lain yang memerlukan perhatian yang lebih mendalam.

#### **4.2 ANALISA KOMPONEN BEBAN/(MANFAAT) PAJAK TANGGUHAN**

Dasar pembahasan beban/(manfaat) pajak tangguhan adalah beberapa pemikiran yang sudah dibahas pada bab II, di antaranya Phillip et al.<sup>6</sup> Menyebut istilah "tax-efficient" earnings management bahwa perusahaan berusaha mengatur penggelembungan laba tetapi tanpa menaikan beban pajak yang harus dibayar.

Mengutip, Gunadi<sup>7</sup> merupakan suatu kelaziman yang diterima secara umum bahwa di antara perusahaan terdapat kecenderungan untuk membayar pajak serendah mungkin. Upaya tersebut, antara lain, dilakukan melalui pembesaran jumlah biaya (*expenses inflated*).

Dasar pembahasan DTE sebagai alat deteksi manajemen laba mempunyai keterbatasan (menjadi tidak berfungsi) jika, kondisi yang ditemukan oleh Erickson<sup>8</sup> bahwa dari sample 27 perusahaan yang dituduh

---

<sup>6</sup> Ibid, hlm 5

<sup>7</sup> Gunadi, Pajak Internasional:Gramedia, Edisi revisi 2007 hlm20

<sup>8</sup> Erickson, 2004

oleh SEC yang menggelembungkan laba. banyak dari perusahaan mau membayar pajak atas laba yang digelembungkan. Artinya manajemen berpikir bahwa tambahan laba \$1 lebih bernilai dari \$0,11 uang cash yang dibayar.

Untuk kepentingan analisa pembahasan atas 90 perusahaan yang diambil berdasarkan 2 (dua) kondisi di bawah ini

1. Mengacu pada Ettredge et al.<sup>9</sup> yang meneliti perbandingan DTE antara perusahaan fraud dan non fraud 1 tahun sebelum terjadi fraud (di USA), yang menemukan bahwa variable DTE perusahaan yang melakukan fraud sebesar 0,003, sedang yang tidak melakukan fraud sebesar -0,002 dengan rumus :

$DTE = \text{Deferred tax expense in year } t, \text{ scaled by Avg. TA}$

$\text{Avg. TA} = [\text{firm } I\text{'s total assets for } t-1 \text{ (TA}_{t-1}) + \text{firm } I\text{'s total assets for } t \text{ (TA}_t)] \text{ divided by } 2$

Maka dalam pembahasan bab IV ini menjadikan variable DTE lebih dari 0,003 dijadikan tolok ukur pengambilan sample sebagai perusahaan dengan DTE Gap significant dan sebagai pembandingnya diambil variable DTE kurang dari -0,002.

Kedua kelompok ini akan dianalisa untuk menyimpulkan apakah perusahaan di Indonesia dapat dinilai dari aspek DTE yang akan dibandingkan dengan perusahaan dengan DTE lebih dari - 0,002 atau (DTI 0,002)

---

<sup>9</sup> Ettredge, Michael et al, Are High Deferred Tax Levels Associated with Earnings Fraud? 2007 hlm

2. mengacu Mengacu pada PPR - 2003, bahwa komponen yang menimbulkan perbedaan laba komersial dan laba pajak, perusahaan dengan DTE lebih atau sama dengan 0,003 komponen penyebab timbulnya DTE dibagi menjadi 3 kategori :

Kategori 1 (accrual & reserved merupakan discretionary manajemen)

- (1) revenue and expense accruals and reserves
- (2) compensation
- (3) depreciation of tangible assets
- (4) other asset valuation
- (5) miscellaneous items

Kategori 1 diperlakukan sebagai diskretionari manajemen<sup>10</sup>, karena mengacu Phillips et al<sup>11</sup>, *managers prefer to manage pre-tax earnings in ways that do not increase current taxable income, and such earnings management leads to greater book-tax differences and an increase in one or more of these five components, which should be useful in detecting earnings management*

---

<sup>10</sup>Kamus Akuntansi, Discretionary Cost didefinisikan sebagai biaya yang sangat mudah berubah oleh keputusan manajemen seperti periklanan, perbaikan dan pemeliharaan, serta penelitian dan pengembangan, juga disebut managed cost (biaya pengelolaan). Analis harus mencatat apakah tingkat beban diskresi yang berjalan telah konsisten dengan kecenderungan sebelumnya dan dengan keperluan perusahaan sekarang dan masa datang. Biaya diskresi ini sering dikurangi bila perusahaan mengalami kesulitan atau ingin memperlihatkan kecenderungan keuntungan yang stabil. Pengurangan biaya diskresi ini dapat menyebabkan kerusakan quality of earnings (mutu penghasilan) karena manajemen memaksa perusahaan dengan menurunkan pengeluaran yang penting (misalnya, kurangnya perbaikan akan menyebabkan rusaknya peralatan). Biaya diskresi cenderung akan dihitung sebagai persentase penjualan bersih yang berkaitan dengan aktiva yang harus diperiksa.

<sup>11</sup> Phillips et al, ibid hlm 7

Kelima komponen ini dijadikan acuan keberadaan dari manajemen laba, karena besarnya (jumlah) dan kapan dibukukannya kelima komponen ini dapat ditentukan oleh manajemen secara bebas.

Kategori 2 (komponen ini bukan merupakan discretionary manajemen)

(1) income tax carryforwards

(2) unrealized gains and losses on securities

Kategori 2 diperlakukan sebagai bukan diskretionari manajemen, karena mengacu Phillips et al<sup>12</sup> *Managing pre-tax book earnings in ways that do not affect taxable income does not affect deferred assets related to tax carryforwards, since only changes in taxable income affect tax carryforwards. Similarly, pre-tax earnings management cannot affect deferred tax assets and liabilities related to unrealized gains and losses from securities.*

Kedua komponen ini tidak dijadikan acuan keberadaan dari manajemen laba, karena besarnya (jumlah) dan kapan dibukukannya kedua komponen ini tidak dapat ditentukan oleh manajemen secara bebas, dimana pemanfaatan *income tax carryforwards* ditentukan oleh Undang-undang Perpajakan dan *unrealized gains and losses on securities* ditentukan oleh pasar saham.

Kategori 3 (komponen ini dapat menjadi discretionary manajemen)

deferred tax asset valuation allowance account/VAA.

---

<sup>12</sup> Ibid hlm 8

Satu kategori komponen ini diperlakukan sebagai diskretonari manajemen, karena mengacu Phillips et al<sup>13</sup> *VAA would lead to the incorrect inference that this account had been managed to increase earnings.*

Komponen ini dijadikan acuan keberadaan dari manajemen laba, karena besarnya (jumlah) dan kapan dibukukannya dapat ditentukan oleh manajemen secara bebas.

#### **4.2.1 ANALISA KOMPONEN BEBAN/(MANFAAT) PAJAK TANGGUHAN TOTAL PERUSAHAAN**

Proses 1 dan 2 diterapkan pada perusahaan dengan 45 perusahaan dengan DTE > 0,003 yang dibandingkan dengan 45 perusahaan dengan DTE <0,0002, hasilnya sbb :

<b>status DTE</b>	<b>Jumlah perusahaan</b>	<b>T. Asset</b>	<b>Total DTE - Rata-rata</b>	<b>%DTE</b>
DTE >0,003	45	142.752.399	1.807.006	0,087
DTE <-0,002	45	88.433.373	(909.974)	(0,080)

Kesimpulan dari data adalah perusahaan dengan total asset yang lebih besar memiliki kecenderungan DTE lebih tinggi dari pada perusahaan dengan total asset yang lebih rendah.

Apakah ini merupakan indikasi adanya earnings management atau manipulasi laba? Pada umumnya seluruh penelitian menyimpulkan bahwa semakin besar DTE makin besar kemungkinan manipulasi laba, salah satu

<sup>13</sup> Ibid, 10

kesimpulan di ambil dari penelitian Yulianti <sup>14</sup> *the bigger the value of Accrual and Deferred Tax Expenses the bigger the probability of earnings management practices.*

Analisa dengan pembagian 8 type komponen *Phillips model*, menunjukkan :

<u>Type of changes</u>	<u>DTE &gt;0,003</u>	<u>DTE &lt;-0,002</u>
revenue & expense accruals & reserves	28.122	(635.133)
Compensation	(41.715)	(77.796)
depreciation of tangible assets	766.371	227.842
other asset valuation	44.427	(17.837)
miscellaneous items	87.435	(128.376)
Tax carry forwards	922.813	(242.381)
unrealized gains and losses from securities	26	-
The deferred tax asset valuation	(468)	(36.291)
<b>Total</b>	<b>1.807.010</b>	<b>(909.972)</b>

Komponen terbesar pada perusahaan-perusahaan dengan DTE lebih dari 0,003 adalah tax carryforwards sebesar 51%, kedua terbesar adalah depreciation of tangible assets sebesar 42%; untuk perusahaan dengan DTE kurang dari -0,002 menunjukkan bahwa komponen terbesar dari DTE adalah depreciation of tangible assets sebesar 25%

**Kesimpulan yang bisa diperoleh dari gambaran ini adalah :**

Sebagian besar perusahaan yang DTE nya over 0,003 pernah mengalami kerugian mengalami kerugian sehingga memiliki tax carryforwards. Dari Phillips model, tax carryforwards masuk dalam kategori non diskresioneri manajemen, artinya tidak ada earnings manajemen atas perusahaan tersebut.

<sup>14</sup> Yulianti, Kemampuan Beban Pajak Tangguhan Dalam Mendeteksi Manajemen Laba, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Departemen Akuntansi FEUI, 2005 hlm 1

Analisa lebih lanjut dari informasi tax carryforwards ini adalah kenapa perusahaan-perusahaan di Indonesia (terkait dengan sample yang diambil) menunjukkan kerugian. Apakah hal ini menunjukkan iklim investasi atau iklim usaha yang tidak baik, bagi perusahaan dengan asset yang besar, atau ada perbedaan antara kategori diskretioneri di Amerika (acuan) dengan di Indonesia. Dimana terdapat kemungkinan bahwa kerugian atau tax carryforwards bukan disresioneri di Amerika tetapi merupakan disresionari di Indonesia. Mengutip kelaziman umum yang disampaikan diawal bahwa terdapat kecenderungan untuk membayar pajak serendah mungkin. Upaya tersebut, antara lain, dilakukan melalui pembesaran jumlah biaya (*expenses inflated*)

Analisa mengenai depreciation of tangible assets, menurut Phillips dikategorikan 1 sebagai disresioneri manajemen, dari data menunjukkan kedua kelompok DTE  $>0,003$  dan kelompok DTE  $<-0,002$  memberi kontribusi tinggi, hal ini menunjukkan kelaziman PSAK 46, paling mudah dipahami dan diimplementasikan adalah dari konsep penyusutan aktiva tetap, karena semua referensi mengenai PSAK 46 cenderung menampilkan perbedaan penyusutan ini sebagai variable beda temporer.

Pertanyaannya apakah variable atau komponen depreciation of tangible assets memang merupakan indikator terjadinya manajemen laba? Menurut penulis, hal ini bisa menjadi alat bagi manajemen untuk melakukan manajemen laba, tetapi karena perhitungan dan tarif penyusutan yang merupakan kebijakan manajemen dituangkan dalam

laporan audit, hal ini relatif sulit untuk dijadikan alat untuk manipulasi/manajemen laba.

Menurut penulis hal ini anomali/kebalikan dari teori yang disampaikan oleh Phillips et al

#### 4.2.2 ANALISA KOMPONEN BEBAN/(MANFAAT) PAJAK TANGGUHAN BERDASARKAN SEKTOR PERUSAHAAN

(data secara lengkap dapat dilihat pada lampiran)

*berdasarkan total perusahaan*

SEKTOR	status DTE	Jumlah	T. Asset	Total DTE - Rata-rata	%DTE
TOTAL	DTE >0,003	45	142.752.399	1.807.006	0,087
	DTE <-0,002	45	88.433.373	(909.974)	(0,080)
ANEKA INDUSTRI	DTE >0,003	7	9.323.332	74.700	0,008
	DTE <-0,002	7	3.803.854	(25.674)	(0,007)
INDUSTRI BARANG KONSUMSI	DTE >0,003	7	27.956.230	197.214	0,007
	DTE <-0,002	5	14.106.423	(76.352)	(0,005)
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA	DTE >0,003	10	23.576.460	375.387	0,016
	DTE <-0,002	10	11.112.190	(102.451)	(0,009)
INFRASTRUKTUR, UTILITAS & TRANSPORTASI	DTE >0,003	5	48.438.775	786.387	0,016
	DTE <-0,002	3	2.979.532	(21.310)	(0,007)
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI	DTE >0,003	8	2.271.808	19.533	0,009
	DTE <-0,002	13	8.188.282	(52.596)	(0,006)

PERTAMBANGAN	DTE >0,003	2	22.487.460	272.863	0,012
	DTE <-0,002	4	39.107.113	(541.970)	(0,014)
PERTANIAN	DTE >0,003	2	2.004.053	19.505	0,010
	DTE <-0,002	1	640.664	(14.201)	(0,022)
PROPERTI DAN REAL ESTAT	DTE >0,003	4	6.694.283	61.417	0,009
	DTE <-0,002	2	8.495.317	(75.420)	(0,009)

*berdasarkan rata-rata*

SEKTOR	status DTE	T. Asset	Total DTE - Rata-rata	%DTE
TOTAL	DTE >0,003	3.172.276	40.156	0,013
	DTE <-0,002	1.965.186	(20.222)	(0,010)
ANEKA INDUSTRI	DTE >0,003	1.331.905	10.671	0,008
	DTE <-0,002	543.408	(3.668)	(0,007)
INDUSTRI BARANG KONSUMSI	DTE >0,003	3.993.747	28.173	0,007
	DTE <-0,002	2.821.285	(15.270)	(0,005)
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA	DTE >0,003	2.357.646	37.539	0,016
	DTE <-0,002	1.111.219	(10.245)	(0,009)
INFRASTRUKTUR, UTILITAS & TRANSPORTASI	DTE >0,003	9.687.755	157.277	0,016
	DTE <-0,002	993.177	(7.103)	(0,007)
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI	DTE >0,003	283.976	2.442	0,009
	DTE <-0,002	629.868	(4.046)	(0,006)
PERTAMBANGAN	DTE >0,003			

		11.243.730	136.432	0,012
	DTE <-0,002	9.776.778	(135.493)	(0,014)
PERTANIAN	DTE >0,003	1.002.027	9.753	0,010
	DTE <-0,002	640.664	(14.201)	(0,022)
PROPERTI DAN REAL ESTAT	DTE >0,003	1.673.571	15.354	0,009
	DTE <-0,002	4.247.659	(37.710)	(0,009)

**Analisa berdasarkan sektor ini dapat di gambarkan sebagai berikut :**

Sektor Perusahaan dengan DTE tertinggi adalah sektor INDUSTRI DASAR DAN KIMIA; INFRASTRUKTUR, UTILITAS & TRANSPORTASI; dengan DTE, 0.016; Sektor Perusahaan dengan DTE terendah adalah sektor Pertanian dengan DTE/I, -0,009

Range dari masing-masing sektor menunjukkan hal yang tidak unik, yang menunjukkan bahwa DTE tidak dapat difokuskan pada 1 (satu) sektor tertentu, sektor menyebar.

**Analisa berdasarkan sektor atas 8 komponen Phillips,**

Dari keseluruhan sektor informasi yang paling menyolok adalah data mengenai komponen unrealized gains dan losses from securities, praktis hanya ada sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi yang memiliki transaksi. Artinya ada 2 kemungkinan, 1) transaksi securities oleh perusahaan masih belum lazim di Indonesia, 2) perlakuan atas laba – rugi atas securities belum dianggap sebagai komponen beda temporer.

Data menyolok kedua adalah data mengenai deferred tax asset valuation, yang praktis hanya ada dua sektor industri yang bertransaksi yakni Industri Barang Konsumsi dan Pertambangan. Artinya ada 2 kemungkinan juga, 1) seluruh DTA ataupun DTL yang terjadi di masing-masing perusahaan tidak ada dan tidak diperlukan adjustment atau penyesuaian atas saldo, penyesuaian langsung mengoffset saldo DTA ataupun DTL, 2) komponen DTA ataupun DTL yang tercatat tidak dievaluasi kembali kewajaran saldonya apakah masih "exist" atau sudah "expired" yang seharusnya disesuaikan kembali.

Data per sektor ini jika dikaitkan dengan pembahasan secara total bahwa komponen terbesar dari pajak tangguhan ini adalah tax carryforwards, data dikonfirmasi seluruh sektor memiliki saldo tax carryforwards, berarti seluruh sektor perusahaan pernah mengalami kerugian, dan khusus untuk kerugian ini tidak ada keraguan untuk membukukan sebagai komponen pajak tangguhan.

Analisa per komponen sebagai berikut :

#### **1) Revenue & expenses accruals & reserves**

Komponen ini seharusnya yang paling ideal untuk melakukan manajemen laba, karena tidak terikat dengan schedule yang sudah jelas dan mesti ada, seperti kompensasi, depresiasi, tax carryforwards. Data pada tabel tidak menunjukkan angka yang signifikan, kecuali di sektor industri dasar dan kimia, dan industri Infrastruktur, utilitas dan transportasi

## 2) Compensation

Komponen ini oleh Phillips et al, dianggap sebagai diskretoneri manajemen, di Indonesia penerapan PSAK 24, Imbalan Kerja (revisi 2004) secara efektif diberlakukan sejak 1 Juli 2004. menggantikan PSAK 24: Akuntansi Biaya Manfaat Pensiun yang disahkan pada tanggal 7 September 1994

Tujuan PSAK 24 mengatur akuntansi dan pengungkapan imbalan kerja.

PSAK ini mengharuskan perusahaan untuk mengakui :

- a. kewajiban jika pekerja telah memberikan jasanya dan berhak memperoleh imbalan kerja yang akan dibayarkan di masa depan; dan
- b. beban jika perusahaan menikmati manfaat ekonomis yang dihasilkan dari jasa yang diberikan oleh pekerja yang berhak memperoleh imbalan kerja.

Untuk perhitungan besarnya imbalan kerja yang harus dicadangkan disarankan menggunakan aktuaria (perusahaan independen), karena perusahaan sifatnya going concern, kecenderungan perusahaan akan berkembang, sehingga saldo imbalan kerja ini akan naik terus seiring dengan berkembangnya perusahaan. Yang berarti secara teoritis DTI juga naik dan DTanya juga naik. Jika dilihat pada sektor pertambangan ada penurunan DTA sebesar 26.3 miliar untuk total 2 perusahaan, hal ini mengindikasikan terdapat adjustment saldo, yang bisa berarti kesalahan hitung aktuaria, ataupun sesuai rujukan Phillips, terdapat manajemen laba.

### **3) Depreciation of tangible assets**

Sesuai pembahasan di awal, menurut penulis penyusutan ini cenderung sulit digunakan untuk manajemen laba, kecuali melibatkan auditor dari KAP, karena perhitungannya sangat mudah diperiksa kebenarannya.

### **4) others asset valuation**

Komponen ini digunakan untuk menampung penilaian asset lainnya, seperti leasing, dan intangible asset lainnya. Sektor yang memiliki kontribusi terbesar adalah dari Pertambangan kemudian Industri barang konsumsi, kemudian infrastruktur, utilitas dan transportasi. Data ini dapat digunakan untuk menganalisa seberapa banyak Sumber Daya intangible asset yang dimiliki oleh perusahaan, dari urutan sektor yang disebutkan, masih cukup relevan, karena unsur intangible asset di pertambangan mesti ada seperti cadangan minyak, tambang dan seterusnya. Apakah akan atau dapat dimanfaatkan untuk manajemen laba. Jawabannya adalah kemungkinan besar bisa.

### **5. miscelleneaeous items**

Komponen ini digunakan untuk menampung items lain-lainnya, khusus untuk pengelompokan di tabel yang dibuat penulis, isi lebih banyak terdiri dari perubahan DTA atau DTL dari anak perusahaan. Hal ini seharusnya tidak diperkenankan dalam PSAK 46, karena untuk bisa menganalisa

manajemen laba secara total atau menyeluruh DTA atau DTL anak perusahaan harusnya didisclose juga.

- 6. tax carryforwards, 7. unrealized gains and losses from securities, dan**
- 8. the deferred tax asset valuation,**

Ketiganya sudah dibahas diatas



## **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya adalah :

- a. Tujuan Akuntansi Pajak Penghasilan (PSAK 46) adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Tujuan ini jika diteliti pada perusahaan yang terdaftar pada BEJ (206 perusahaan), ada 10 perusahaan yang tidak menerapkan PSAK 46. Hal ini mengindikasikan bahwa sosialisasi PSAK 46 cukup berhasil. Akuntansi Pajak Tangguhan memberi kesempatan bagi perusahaan untuk menunjukkan komponen-komponen yang menyebabkan perbedaan laba menurut akuntansi komersial dan laba menurut akuntansi pajak. Jadi akuntansi pajak tangguhan tidak memberikan keleluasaan atau kebebasan bagi perusahaan untuk melaporkan laba kena pajak serendah mungkin dan sebaliknya melaporkan laba komersial setinggi mungkin, tetapi menyediakan sarana atau tempat bagi perusahaan untuk menunjukkan secara jelas apa yang menyebabkan perbedaan laba kena pajak dan laba komersial.
- b. Perkembangan analisa manajemen laba sudah berkembang dimulai dengan penggunaan discretionary accrual yang meneliti discontinuities dari earnings distribution, yang kemudian timbul metode Deferred Tax

Expenses yang dilengkapi metode Deferred Tax Liabilities. Beberapa penelitian atas perkembangan manajemen laba ini diterapkan di Indonesia, dari model discretionary accrual dan juga deferred tax expenses yang keseluruhannya mencoba menggunakan model statistik, hasil penelitian yang tidak dipublikasikan secara terbuka, dan hanya terbatas dikalangan akademisi yang mengakui adanya manajemen laba yang terukur karena adanya discontinuities dari earnings distribution. Penelitian pada thesis ini atas 45 perusahaan yang memiliki tax gap 0,003 yang diperbandingkan dengan 45 perusahaan lainnya yang memiliki tax gap minus 0,002 berdasarkan analisa elemen atau komponen pajak tangguhan mengacu model Phillips, Pincus, Rego, Wan, yang membagi komponen pajak tangguhan kedalam 3 kategori atas 8 elemen menyimpulkan perbedaan yang mendasar dari perusahaan dengan tax gap yang tinggi dan perusahaan yang memiliki tax gap yang rendah adalah bahwa perusahaan dengan tax gap yang tinggi pada umumnya memiliki cadangan kerugian yang dikompensasi (tax carry forward). Menurut Phillips Pincus Rego Wan, tax carryforward dianggap merupakan non discretionary manajemen tetapi mengacu pada Financial Accounting Theory dari William R. Scott, salah satu bentuk manajemen laba adalah dengan *taking a bath*. Kesimpulannya kualitas laba komersial perusahaan dapat dilihat dari komponen penyebab perbedaan laba pajak dan laba komersial, tetapi khusus kategori *discretionary* dan *non discretionary* tersebut perlu dikaji kembali.

## 5.2 Saran

Atas dasar kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan Karya Akhir ini, penulis mencoba mengajukan saran-saran sebagai berikut :

### 1. Peneliti/akademisi

Perlu terus dikembangkan model earnings management detection dengan penyesuaian iklim dan kondisi perusahaan di Indonesia, sehingga berdampak positif bagi pengguna laporan keuangan

### 2. Auditor

Perlu mendapatkan detail ataupun fakta beda tetap ataupun beda temporer atas perusahaan yang diaudit sehingga laporan keuangan audited bisa lebih informatif dan tidak misleading (menyesatkan)

### 3. IAI

Perlu penyempurnaan PSAK 46, diantaranya kewajiban melakukan disclosure atas seluruh komponen pajak tangguhan

### 4. Otoritas Perpajakan

Perlu meneliti lebih dalam fenomena banyaknya tax carryforward, apakah itu suatu realita atau rekayasa

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Gunadi, *Akuntansi Pajak Sesuai dengan Undang-undang Pajak Baru*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta:1999

-----, *Pajak Internasional*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPFEUI), Jakarta:edisi revisi (2007)

-----, *Pajak Dalam Aktivitas Bisnis*, Penerbit Abdi Tandur: 1999

Judisseno Rimsky K, *Pajak & Strategy Bisnis*, Edisi Revisi, Penerbit PT Gramedia, Jakarta, 2005.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 46, *Akuntansi Pajak Penghasilan*, IAI. Jakarta, 1997

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 24, *Imbalan Kerja (Revisi 2004)*, IAI. Jakarta, Revisi 2004

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 23, *Pendapatan*, IAI. Jakarta, 1994

Sekaran, Uma, *Reseach Methods for Business, A Skill-Building Approach*, John Wiley & Sons, Inc., NYC:2000

Purba, Marisi P. & Andreas, *Akuntansi Pajak Penghasilan Berdasarkan IAS No. 12 & PSAK No. 46*, Penerbit Graha Ilmu 2005

Agoes, Sukrisno & Trisnawati, Estralita, *Akuntansi Perpajakan*, penerbit Salemba Empat 2007

Hutagaol, John, *Kapita Selektta Akuntansi Pajak*, Penerbit Kharisma 2003

Baridwan, Zaki, *Akuntansi Keuangan Intermediate Masalah-masalah khusus*, Edisi 1 Penerbit BPFE Yogyakarta 2001

Halim, Jusuf, *Akuntansi Pajak Penghasilan, Aplikasi dan contoh penerapan PSAK 46*, Penerbit Ikatan Akuntan Indonesia, 2003

Scott, William R., *Financial Accounting Theory, Third Edition*, penerbit Prentice Hall, 2003

- Epstein, Barry J. & Mirza, Abbas Ali., *IAS Interpretation and Application of International Accounting and Financial Reporting Standards*, John Wiley & Sons, Inc., 2004
- Stein Neil, *Business Taxation*, Heinemann Professional Publishing, 1989
- Scholes, Myron S. & Wolfson, Mark A., *Taxes And Business Strategy A Planning Approach*, Prentice Hall, 1992
- Ault, Hugh J., *Comparative Income Taxation: A Structural Analysis*, Kluwer Law International, 1997
- Deloitte & Touche, *How to Reduce The Tax You Pay*, Key Porter Books Ltd:2002
- International Tax Planning Toolkit For Corporations*, CCH Australia Limited, NSW:2001
- Knapp, Michael C., *Contemporary Auditing Issues and Cases*, South-Western College Publishing: 1999
- Brooks, Leonard J., *Business & Professional Ethics for Accountants*, Thomson Learning Custom Publishing:2002
- Smith, Jay M., & Skousen, K.Fred, *Intermediate Accounting Ninth Edition*, South-Western Publishing Co., 1990
- Dyckman, Thomas R., Dukes, Roland E. & Davis, Charles J., *Akuntansi Intermediate Edisi Ketiga*, Penerbit Erlangga:2001
- Kieso, Donald E., Weygrandt, Jerry J. & Warfield, Terry D., *Akuntansi Intermediate Edisi Kesepuluh*, Penerbit Erlangga: 2002
- Marom, Chairul, *Akuntansi Pajak Penghasilan (Deferred Tax) sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 46)*, Penerbit Pustaka Damar:2002
- Markus, Muda & Yujana, Lalu Hendry, *Pajak Penghasilan Edisi Revisi*, Penerbit Gramedia:2004
- Tuanakotta, Theodorus M., *Teori Akuntansi*, Penerbit LPFE Universitas Indonesia:1984
- Lumbantoruan, Sophar, *Akuntansi Pajak*, Penerbit Grasindo:1993
- Soekadi, Eddy P. *Mekanisme Leasing*, Penerbit Ghalia Indonesia:1994

**Journal:**

Ettredge, Michael., Sun, Lili., Lee, Picheng., Anandarajan, Asokan., "Are High Deferred Tax Levels Associatie with Earnings Fraud?" ssrn.com May 2007

Phillips, John., Pincus, Morton., Rego, Sonja Olhoft., Wan, Huishan., "Decomposing Changes in Deferred Tax Assets and Liabilities to Isolate Earnings Management Activities", University of Iowa, September 2003

Yulianti, "Penggunaan Distribusi Laba Dalam Mendeteksi Manajemen Laba", Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Departemen Akuntansi FE UI Desember 2004

-----, "Kemampuan Beban Pajak Tangguhan Dalam Mendeteksi Manajemen Laba", Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Departemen Akuntansi FE UI Juli 2005

Permatasari, Ika, "Manajemen Laba dan Status Keterlambatan Perusahaan dalam Menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan", Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Juli-Desember 2005

Assih, Prihat. Hastuti, Ambar Woro, & Parawiyati, "Pengaruh Manajemen Laba Pada Nilai Dan Kinerja Perusahaan", Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Juli-Desember 2005

Achmad, Komarudin, et al, "Investigasi Motivasi dan Strategi Manajemen Laba pada perusahaan publik di Indonesia", Simposium Nasional Akuntansi X, Unhas Makassar 26-28 Juli 2007

## BIBLIOGRAFI

Beberapa literatur mengenai manajemen laba yang dapat dipakai sebagai referensi :

Healy & Wahlen 1999, McNichols 2000: Manajemen mempunyai beberapa insentif untuk menggelembungkan laba secara material.

Argenti 1976, Summers & Sweeney 1998, Rosner 2003: dalam hal tertentu, tekanan dapat menimbulkan keinginan untuk memanipulasi keuangan

DeFond & Jiambalvo 1994, Beatty & Weber 2003, Chen&Wei 1993: keinginan untuk menghindari tekanan akibat hutang

Dechow, Sloan, Sweeney 1996: keinginan untuk merangsang pendanaan external dengan biaya yang rendah

Burgstahler & Dichev 1997, Bartov et al. 2003, Graham et al. 2005 : keinginan untuk mencapai ekpektasi laba

Bartov et al.2002, Farrell & Whidbee 2003, Feng 2004, Francis et al. 2004, Desai et al.2006) : keinginan untuk menunjukkan kompetensi dan reputasi karir yang meningkat

Healy 1985, Matsunaga & Park 2001, Beneish 1999, Crocker & Slemrod 2005: keinginan untuk menjaga harga saham yang tinggi untuk mendapatkan kompensasi dan transaksi "insider trading"

Hasil penelitian terhadap komponen DTL 45 perusahaan dengan DTE>0,003 dan -0,002

Rp in juta

Type of changes	DTE>0,003	q	DTE<-0,002	q
revenue & expense accruals & reserves	28.122	30	(635.133)	32
compensation	(41.715)	43	(77.796)	45
depreciation of tangible assets	766.371	43	227.842	43
other asset valuation	44.427	23	(17.837)	25
miscellaneous items	87.435	17	(128.376)	25
tax carry forwards	922.813	37	(242.381)	17
unrealized gains and losses from securities	26	1	-	-
the deferred tax asset valuation	(468)	2	(36.291)	1
<b>Total</b>	<b>1.807.011</b>	<b>45</b>	<b>(909.972)</b>	<b>45</b>

komposisi perusahaan yang diperbandingkan  
angka merupakan jumlah total

SEKTOR	status DTE	Jumlah perusahaan	T. Asset	Total DTE - Rata-rata	%DTE	revenue & expense accruals & reserves	compensation	depreciation of tangible assets	other asset valuation	miscellaneous items	tax carry forwards	unrealized gains and losses from securities	the deferred tax asset valuation
												6	7
TOTAL	DTE >0,003	45	142.752.399	1.807.006	0,087	28.122	(41.715)	766.371	44.427	87.435	922.813	26	(468)
	DTE <-0,002	45	88.433.373	(909.974)	(0,080)	(635.133)	(77.796)	227.842	(17.837)	(128.376)	(242.381)	-	(36.291)
ANEKA INDUSTRI	DTE >0,003	7	9.323.332	74.700	0,008	(2.146)	(11.291)	25.987	18.930	58	43.165	-	-
	DTE <-0,002	7	3.803.854	(25.674)	(0,007)	(3.084)	1.048	(13.853)	(1.974)	(38)	(7.773)	-	-
INDUSTRI BARANG KONSUMSI	DTE >0,003	7	27.956.230	197.214	0,007	(1.559)	(32.852)	134.056	5.053	(374)	93.083	-	(192)
	DTE <-0,002	5	14.106.423	(76.352)	(0,005)	(796)	(14.199)	3.833	(58.987)	(6.203)	-	-	-
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA	DTE >0,003	10	23.576.460	375.387	0,016	17.468	(15.549)	8.181	5.723	44.555	315.010	-	-
	DTE <-0,002	10	11.112.190	(102.451)	(0,009)	1.994	(10.782)	(61.154)	183	(32.714)	21	-	-
INFRASTRUKTUR, UTILITAS & TRANSPORTASI	DTE >0,003	5	48.438.775	786.387	0,016	10.557	(5.418)	556.761	13.908	48.188	162.365	26	-
	DTE <-0,002	3	2.979.532	(21.310)	(0,007)	2.171	(2.973)	(2.156)	(9.106)	(3.254)	(5.992)	-	-
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI	DTE >0,003	8	2.271.808	19.533	0,009	4.686	(844)	3.395	1.214	(2.263)	13.346	-	-
	DTE <-0,002	13	8.188.282	(52.596)	(0,006)	(2.387)	(6.866)	(6.280)	(288)	(17.983)	(18.789)	-	-
PERTAMBANGAN	DTE >0,003	2	22.487.460	272.863	0,012	-	26.320	31.149	(1.061)	(4.060)	220.790	-	(276)
	DTE <-0,002	4	39.107.113	(541.970)	(0,014)	(641.224)	(39.208)	366.143	52.336	(32.404)	(211.321)	-	(36.291)
PERTANIAN	DTE >0,003	2	2.004.053	19.505	0,010	(191)	(1.471)	7.852	660	89	12.566	-	-
	DTE <-0,002	1	640.664	(14.201)	(0,022)	8.200	(2.394)	(23.882)	-	(195)	4.070	-	-
PROPERTI DAN REAL ESTAT	DTE >0,003	4	6.694.283	61.417	0,009	(693)	(610)	(1.010)	-	1.242	62.488	-	-
	DTE <-0,002	2	8.495.317	(75.420)	(0,009)	(7)	(2.423)	(34.808)	-	(35.585)	(2.597)	-	-

komposisi perusahaan yang diperbandingkan  
angka merupakan jumlah rata-rata

SEKTOR	status DTE	T. Asset	Total DTE - Rata-rata	%DTE	revenue & expense accruals & reserves	compen- sation	depreciat ion of tangible assets	other asset valuation	miscellan eous items	tax carry forwards	unrealize	the
											d gains and losses from securitie s	deferred tax asset valuation
TOTAL	DTE >0,003	3.172.276	40.156	0,013	625	(927)	17.030	987	1.943	20.507	1	(10)
	DTE <-0,002	1.965.186	(20.222)	(0,010)	(14.114)	(1.729)	5.063	(396)	(2.853)	(5.386)	-	(806)
ANEKA INDUSTRI	DTE >0,003	1.331.905	10.671	0,008	(307)	(1.613)	3.712	2.704	8	6.166	-	-
	DTE <-0,002	543.408	(3.668)	(0,007)	(441)	150	(1.979)	(282)	(5)	(1.110)	-	-
INDUSTRI BARANG KONSUMSI	DTE >0,003	3.993.747	28.173	0,007	(223)	(4.693)	19.151	722	(53)	13.298	-	(27)
	DTE <-0,002	2.821.285	(15.270)	(0,005)	(159)	(2.840)	767	(11.797)	(1.241)	-	-	-
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA	DTE >0,003	2.357.646	37.539	0,016	1.747	(1.555)	818	572	4.456	31.501	-	-
	DTE <-0,002	1.111.219	(10.245)	(0,009)	199	(1.078)	(6.115)	18	(3.271)	2	-	-
INFRASTRUKTUR, UTILITAS & TRANSPORTASI	DTE >0,003	9.687.755	157.277	0,016	2.111	(1.084)	111.352	2.782	9.638	32.473	5	-
	DTE <-0,002	993.177	(7.103)	(0,007)	724	(991)	(719)	(3.035)	(1.085)	(1.997)	-	-
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI	DTE >0,003	283.976	2.442	0,009	586	(106)	424	152	(283)	1.668	-	-
	DTE <-0,002	629.868	(4.046)	(0,006)	(184)	(528)	(483)	(22)	(1.383)	(1.445)	-	-
PERTAMBANGAN	DTE >0,003	11.243.730	136.432	0,012	-	13.160	15.575	(531)	(2.030)	110.395	-	(138)
	DTE <-0,002	9.776.778	(135.493)	(0,014)	(160.306)	(9.802)	91.536	13.084	(8.101)	(52.830)	-	(9.073)
PERTANIAN	DTE >0,003	1.002.027	9.753	0,010	(96)	(736)	3.926	330	45	6.283	-	-
	DTE <-0,002	640.664	(14.201)	(0,022)	8.200	(2.394)	(23.882)	-	(195)	4.070	-	-
PROPERTI DAN REAL ESTAT	DTE >0,003	1.673.571	15.354	0,009	(173)	(153)	(253)	-	311	15.622	-	-
	DTE <-0,002	4.247.659	(37.710)	(0,009)	(4)	(1.212)	(17.404)	-	(17.793)	(1.299)	-	-

tabel data perusahaan yang di teliti

			TA-2005	TA-2006	TA-AVG	tax 2006		
			Dr	Dr	Dr	Dr(Cr) def	DTE	DTE=>0,003
<b>DATA BISNIS INDONESIA DAN KOMPAS</b>								
		<b>DTL NAIK = PLUS; DTA NAIK = MINUS; DTE NAIK = MINUS</b>						
INFRASTRUKTUR, UTILITAS DAN TRANSPORTASI	4 Transportasi	BLTA	7.908.587	8.205.956	8.057.272	-	-	tdk mengikuti PSAK 46
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI	7 Lainnya	LPLI	58.813	40.395	49.604	-	-	tdk mengikuti PSAK 46
PROPERTI DAN REAL ESTAT	1 Properti & Real Estate	DART	1.402.170	1.496.888	1.449.529	-	-	tdk mengikuti PSAK 46 3 perusahaan
ANEKA INDUSTRI	1 Otomotif dan komponennya	MASA	1.083.291	1.433.688	1.258.490	(42.702)	(0,0339)	menyimpang
INDUSTRI BARANG KONSUMSI	1 Makanan & Minuman	ULTJ	1.249.080	1.254.444	1.251.762	11.209	0,0090	menyimpang
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI	2 Perdagangan Eceran	MAPI	1.922.628	2.265.420	2.094.024	12.319	0,0059	menyimpang
PERTAMBANGAN	2 Pertambangan Minyak & Ga:	MEDC	15.352.030	18.415.830	16.883.930	53.189	0,0032	menyimpang
INDUSTRI BARANG KONSUMSI	3 Farmasi	KLBF	4.633.399	4.624.619	4.629.009	(14.512)	(0,0031)	menyimpang
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA	4 Kimia	UNIC	2.742.290	3.043.810	2.893.050	(10.970)	(0,0038)	menyimpang
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI	6 Perusahaan Investasi	BNBR	7.012.882	8.666.760	7.839.821	27.590	0,0035	menyimpang 7 perusahaan
ANEKA INDUSTRI	1 Otomotif dan komponennya	NIPS	190.225	220.229	205.227	4.416	0,0215	tax gap significant
ANEKA INDUSTRI	1 Otomotif dan komponennya	GJTL	7.479.373	7.276.025	7.377.699	26.146	0,0035	tax gap significant
INDUSTRI BARANG KONSUMSI	1 Makanan & Minuman	DAVO	1.746.895	2.707.801	2.227.348	53.642	0,0241	tax gap significant
INDUSTRI BARANG KONSUMSI	1 Makanan & Minuman	MLBI	575.385	610.437	592.911	4.928	0,0083	tax gap significant
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA	1 Semen	INTP	10.536.340	9.598.280	10.067.310	110.640	0,0110	tax gap significant
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI	1 Perdagangan Besar Barang	INTD	31.328	28.270	29.799	582	0,0195	tax gap significant
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI	1 Perdagangan Besar Barang	MDRN	876.523	893.725	885.124	5.254	0,0059	tax gap significant
PROPERTI DAN REAL ESTAT	1 Properti & Real Estate	SMDM	2.110.028	2.009.121	2.059.575	38.409	0,0186	tax gap significant
PROPERTI DAN REAL ESTAT	1 Properti & Real Estate	FMII	146.994	147.810	147.402	1.157	0,0078	tax gap significant
PROPERTI DAN REAL ESTAT	1 Properti & Real Estate	PWON	1.694.098	2.721.500	2.207.799	11.356	0,0051	tax gap significant
PROPERTI DAN REAL ESTAT	1 Properti & Real Estate	BKSL	1.922.881	2.636.134	2.279.508	10.495	0,0046	tax gap significant
ANEKA INDUSTRI	2 Tekstil & Garmen	RICY	417.333	516.488	466.911	16.780	0,0359	tax gap significant
INDUSTRI BARANG KONSUMSI	2 Rokok	RMBA	1.842.317	2.347.942	2.095.130	11.954	0,0057	tax gap significant
INDUSTRI BARANG KONSUMSI	2 Rokok	GGRM	22.128.851	21.733.034	21.930.943	112.231	0,0051	tax gap significant
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI	2 Perdagangan Eceran	MTSM	101.784	96.959	99.372	768	0,0077	tax gap significant
PERTAMBANGAN	2 Pertambangan Minyak & Ga:	APEX	3.207.286	4.043.663	3.625.475	169.673	0,0468	tax gap significant
PERTANIAN	2 Perkebunan	TBLA	1.451.439	2.049.163	1.750.301	17.927	0,0102	tax gap significant
ANEKA INDUSTRI	3 Alas Kaki	BIMA	86.678	103.963	95.321	2.236	0,0235	tax gap significant
INDUSTRI BARANG KONSUMSI	3 Farmasi	INAF	518.824	686.937	602.881	11.833	0,0196	tax gap significant

			TA-2005	TA-2006	TA-AVG	tax 2006		
DATA BISNIS INDONESIA DAN KOMPAS			Dr	Dr	Dr	Dr(Cr) def	DTE	DTE=>0,003
DTL NAIK = PLUS; DTA NAIK = MINUS; DTE NAIK = MINUS								
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA	3 Logam & sejenisnya	JKSW	289.447	263.493	276.470	19.630	0,0710	tax gap significant
INFRASTRUKTUR, UTILITAS DAN TRANSPORTASI	3 Telekomunikasi	EXCL	9.353.950	12.636.576	10.995.263	348.508	0,0317	tax gap significant
INFRASTRUKTUR, UTILITAS DAN TRANSPORTASI	3 Telekomunikasi	FREN	2.365.417	3.040.817	2.703.117	50.029	0,0185	tax gap significant
INFRASTRUKTUR, UTILITAS DAN TRANSPORTASI	3 Telekomunikasi	ISAT	32.787.133	34.228.658	33.507.896	376.478	0,0112	tax gap significant
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI	3 Restoran, Hotel & Pariwisata	MAMI	622.197	620.624	621.411	6.298	0,0101	tax gap significant
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI	3 Restoran, Hotel & Pariwisata	FAST	377.905	483.575	430.740	3.135	0,0073	tax gap significant
PERTAMBANGAN	3 Pertambangan Logam & Min	INCO	16.496.650	21.227.320	18.861.985	103.190	0,0055	tax gap significant
ANEKA INDUSTRI	4 Kabel	KBLI	489.802	441.085	465.444	18.558	0,0399	tax gap significant
ANEKA INDUSTRI	4 Kabel	KBLM	259.791	279.438	269.615	4.534	0,0168	tax gap significant
ANEKA INDUSTRI	4 Kabel	VOKS	414.293	471.940	443.117	2.030	0,0046	tax gap significant
INDUSTRI BARANG KONSUMSI	4 Kosmetik & Barang Keperlua	MRAT	290.646	291.769	291.208	1.050	0,0036	tax gap significant
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA	4 Kimia	SRSN	338.344	330.445	334.395	12.115	0,0362	tax gap significant
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA	4 Kimia	BUDI	978.597	931.614	955.106	26.064	0,0273	tax gap significant
INFRASTRUKTUR, UTILITAS DAN TRANSPORTASI	4 Transportasi	MIRA	80.861	87.987	84.424	1.122	0,0133	tax gap significant
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI	4 Advertising, Printing & Media	JTPE	85.115	95.727	90.421	2.515	0,0278	tax gap significant
PERTANIAN	4 Perikanan	IIKP	114.279	393.225	253.752	1.578	0,0062	tax gap significant
INDUSTRI BARANG KONSUMSI	5 Peralatan Rumah Tangga	LMPI	505.172	508.865	507.019	2.626	0,0052	tax gap significant
INFRASTRUKTUR, UTILITAS DAN TRANSPORTASI	5 Konstruksi non Bangunan	PTRO	1.096.220	1.199.930	1.148.075	10.250	0,0089	tax gap significant
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI	5 Jasa Komputer & Perangkat	ITTG	19.745	23.999	21.872	508	0,0232	tax gap significant
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA	6 Pakan Ternak	SIPD	1.157.773	1.113.796	1.135.785	32.595	0,0287	tax gap significant
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA	6 Pakan Ternak	CPIN	2.620.029	2.902.419	2.761.224	44.464	0,0161	tax gap significant
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI	6 Perusahaan Investasi	ALKA	46.582	139.557	93.070	473	0,0051	tax gap significant
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA	7 Kayu & Pengolahannya	SULI	1.242.449	1.520.602	1.381.526	54.579	0,0395	tax gap significant
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA	8 Pulp & Kertas	SAIP	2.121.633	2.202.306	2.161.970	35.316	0,0163	tax gap significant
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA	8 Pulp & Kertas	SPMA	1.320.219	1.381.434	1.350.827	15.359	0,0114	tax gap significant
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA	8 Pulp & Kertas	FASW	2.881.808	3.421.892	3.151.850	24.625	0,0078	tax gap significant
45 perusahaan								
ANEKA INDUSTRI	1 Otomotif dan komponennya	GDYR	458.737	454.851	456.794	(1.595)	(0,0035)	fair-sample
ANEKA INDUSTRI	1 Otomotif dan komponennya	INDS	459.703	490.604	475.154	(2.464)	(0,0052)	fair-sample
ANEKA INDUSTRI	1 Otomotif dan komponennya	BRAM	1.709.355	1.530.173	1.619.764	(10.491)	(0,0065)	fair-sample
ANEKA INDUSTRI	1 Otomotif dan komponennya	SUGI	49.729	53.465	51.597	(2.858)	(0,0554)	fair-sample
INDUSTRI BARANG KONSUMSI	1 Makanan & Minuman	AQUA	732.354	795.244	763.799	(6.989)	(0,0092)	fair-sample
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA	1 Semen	SMGR	7.297.860	7.496.419	7.397.140	(76.969)	(0,0104)	fair-sample

			TA-2005	TA-2006	TA-AVG	tax 2006			
DATA BISNIS INDONESIA DAN KOMPAS			Dr	Dr	Dr	Dr(Cr) def	DTE	DTE=>0,003	
DTL NAIK = PLUS; DTA NAIK = MINUS; DTE NAIK = MINUS									
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI	1	Perdagangan Besar Barang MICE	210.163	226.709	218.436	(722)	(0,0033)	fair-sample	
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI	1	Perdagangan Besar Barang TGKA	802.526	1.067.119	934.823	(3.621)	(0,0039)	fair-sample	
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI	1	Perdagangan Besar Barang TIRA	180.277	244.958	212.618	(1.104)	(0,0052)	fair-sample	
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI	1	Perdagangan Besar Barang LTLS	1.608.866	1.830.516	1.719.691	(10.578)	(0,0062)	fair-sample	
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI	1	Perdagangan Besar Barang TMPI	668.990	615.689	642.340	(9.949)	(0,0155)	fair-sample	
PERTAMBANGAN	1	Pertambangan Batu Bara PTBA	2.839.690	3.107.734	2.973.712	(17.706)	(0,0060)	fair-sample	
PERTAMBANGAN	1	Pertambangan Batu Bara BUMI	17.218.193	25.135.359	21.176.776	(244.539)	(0,0115)	fair-sample	
PROPERTI DAN REAL ESTAT	1	Properti & Real Estate LPCK	1.110.566	1.161.980	1.136.273	(3.829)	(0,0034)	fair-sample	
PROPERTI DAN REAL ESTAT	1	Properti & Real Estate LPKR	6.232.234	8.485.854	7.359.044	(71.591)	(0,0097)	fair-sample	
INDUSTRI BARANG KONSUMSI	2	Rokok HMSP	11.934.600	12.659.804	12.297.202	(64.507)	(0,0052)	fair-sample	
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA	2	Keramik, porselen & kaca TOTO	847.605	908.168	877.887	(6.086)	(0,0069)	fair-sample	
INFRASTRUKTUR, UTILITAS DAN TRANSPORTASI	2	Jalan Tol, Pelabuhan, Banda CMNP	1.682.373	1.967.088	1.824.731	(6.722)	(0,0037)	fair-sample	
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI	2	Perdagangan Eceran ALFA	719.830	744.926	732.378	(5.536)	(0,0076)	fair-sample	
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI	2	Perdagangan Eceran SONA	412.439	405.200	408.820	(3.491)	(0,0085)	fair-sample	
PERTAMBANGAN	2	Pertambangan Minyak & Gas ENRG	6.336.237	9.883.392	8.109.815	(237.967)	(0,0293)	fair-sample	
ANEKA INDUSTRI	3	Alas Kaki BATA	305.779	271.461	288.620	(1.238)	(0,0043)	fair-sample	
INDUSTRI BARANG KONSUMSI	3	Farmasi MERK	218.094	282.699	250.397	(940)	(0,0038)	fair-sample	
INDUSTRI BARANG KONSUMSI	3	Farmasi SQBI	165.022	207.136	186.079	(1.687)	(0,0091)	fair-sample	
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA	3	Logam & sejenisnya LION	165.030	187.689	176.360	(790)	(0,0045)	fair-sample	
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA	3	Logam & sejenisnya JPRS	204.990	189.384	197.187	(1.048)	(0,0053)	fair-sample	
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA	3	Logam & sejenisnya PICO	251.143	270.734	260.939	(1.516)	(0,0058)	fair-sample	
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA	3	Logam & sejenisnya LMSH	42.145	43.588	42.867	(386)	(0,0090)	fair-sample	
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA	3	Logam & sejenisnya BTON	27.721	33.674	30.698	(303)	(0,0099)	fair-sample	
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI	3	Restoran, Hotel & Pariwisata PNSE	187.138	202.140	194.639	(827)	(0,0042)	fair-sample	
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI	3	Restoran, Hotel & Pariwisata BAYU	147.930	146.246	147.088	(824)	(0,0056)	fair-sample	
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI	3	Restoran, Hotel & Pariwisata PJAA	903.722	954.271	928.997	(6.010)	(0,0065)	fair-sample	
PERTAMBANGAN	3	Pertambangan Logam & Min ANTM	6.402.714	7.290.906	6.846.810	(41.758)	(0,0061)	fair-sample	
PERTANIAN	3	Peternakan MBAI	627.077	654.250	640.664	(14.201)	(0,0222)	fair-sample	
ANEKA INDUSTRI	4	Kabel IKBI	548.245	590.296	569.271	(3.339)	(0,0059)	fair-sample	
ANEKA INDUSTRI	4	Kabel JECC	322.662	362.648	342.655	(3.689)	(0,0108)	fair-sample	
INDUSTRI BARANG KONSUMSI	4	Kosmetik & Barang Keperluan TCID	545.695	672.197	608.946	(2.229)	(0,0037)	fair-sample	
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA	4	Kimia SOBI	596.642	642.315	619.479	(7.568)	(0,0122)	fair-sample	
INFRASTRUKTUR, UTILITAS DAN TRANSPORTASI	4	Transportasi TMAS	669.966	827.172	748.569	(2.893)	(0,0039)	fair-sample	
INFRASTRUKTUR, UTILITAS DAN TRANSPORTASI	4	Transportasi IATA	405.435	407.030	406.233	(11.695)	(0,0288)	fair-sample	



			TA-2005	TA-2006	TA-AVG	tax 2006			
			Dr	Dr	Dr	Dr(Cr) def	DTE	DTE=>0,003	
DATA BISNIS INDONESIA DAN KOMPAS	DTL NAIK = PLUS; NAIK = MINUS; NAIK = MINUS	DTA DTE							
PROPERTI DAN REAL ESTAT	1 Properti & Real Estate	CTRA	5.306.703	5.153.112	5.229.908	6.012	0,0011	fair	
PROPERTI DAN REAL ESTAT	1 Properti & Real Estate	DILD	1.982.857	1.909.928	1.946.393	1.886	0,0010	fair	
PROPERTI DAN REAL ESTAT	1 Properti & Real Estate	LAMI	374.844	492.327	433.586	155	0,0004	fair	
PROPERTI DAN REAL ESTAT	1 Properti & Real Estate	JRPT	1.448.366	1.682.386	1.565.376	479	0,0003	fair	
PROPERTI DAN REAL ESTAT	1 Properti & Real Estate	DUTI	4.612.140	4.518.811	4.565.476	1.045	0,0002	fair	
PROPERTI DAN REAL ESTAT	1 Properti & Real Estate	OMRE	752.938	724.082	738.510	85	0,0001	fair	
PROPERTI DAN REAL ESTAT	1 Properti & Real Estate	CTRS	1.876.394	1.798.801	1.837.598	73	0,0000	fair	
PROPERTI DAN REAL ESTAT	1 Properti & Real Estate	JAKA	159.844	165.402	162.623	(10)	(0,0001)	fair	
PROPERTI DAN REAL ESTAT	1 Properti & Real Estate	PTRA	706.478	703.808	705.143	(175)	(0,0002)	fair	
PROPERTI DAN REAL ESTAT	1 Properti & Real Estate	RODA	73.907	72.934	73.421	(24)	(0,0003)	fair	
PROPERTI DAN REAL ESTAT	1 Properti & Real Estate	CKRA	47.849	48.859	48.354	(24)	(0,0005)	fair	
PROPERTI DAN REAL ESTAT	1 Properti & Real Estate	RBMS	206.601	204.677	205.639	(112)	(0,0005)	fair	
PROPERTI DAN REAL ESTAT	1 Properti & Real Estate	KIJA	1.976.627	1.907.310	1.941.969	(3.037)	(0,0016)	fair	
PROPERTI DAN REAL ESTAT	1 Properti & Real Estate	GMTD	266.098	268.622	267.360	(434)	(0,0016)	fair	
PROPERTI DAN REAL ESTAT	1 Properti & Real Estate	PUDP	324.243	257.412	290.828	(791)	(0,0027)	fair	
ANEKA INDUSTRI	2 Tekstil & Garmen	PABRX	390.216	553.846	472.031	(1.459)	(0,0031)	fair	
ANEKA INDUSTRI	2 Tekstil & Garmen	HDTX	1.036.533	1.108.896	1.072.715	1.798	0,0017	fair	
ANEKA INDUSTRI	2 Tekstil & Garmen	DOID	924.454	824.158	824.158	(61)	(0,0001)	fair	
ANEKA INDUSTRI	2 Tekstil & Garmen	INDR	5.592.970	5.933.750	5.763.360	(1.590)	(0,0003)	fair	
ANEKA INDUSTRI	2 Tekstil & Garmen	RDTX	364.828	533.788	449.308	(387)	(0,0009)	fair	
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA	2 Keramik, porselen & kaca	ARNA	364.794	478.778	421.786	(943)	(0,0022)	fair	
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI	2 Perdagangan Eceran	RALS	2.338.147	2.527.942	2.433.045	(7.637)	(0,0031)	fair	
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI	2 Perdagangan Eceran	MPPA	4.577.151	6.055.088	5.316.120	2.724	0,0005	fair	
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI	2 Perdagangan Eceran	HERO	1.506.693	1.615.240	1.560.967	(1.370)	(0,0009)	fair	
PERTANIAN	2 Perkebunan	LSIP	2.602.173	2.985.212	2.793.693	7.640	0,0027	fair	
PERTANIAN	2 Perkebunan	UNSP	1.244.909	1.783.001	1.513.955	763	0,0005	fair	
PERTANIAN	2 Perkebunan	SMAR	4.597.227	5.311.931	4.954.579	(1.395)	(0,0003)	fair	
PERTANIAN	2 Perkebunan	AALI	3.191.715	3.496.955	3.344.335	(7.615)	(0,0023)	fair	
PROPERTI DAN REAL ESTAT	2 Konstruksi Bangunan	SSIA	1.397.422	1.349.231	1.373.327	709	0,0005	fair	
PROPERTI DAN REAL ESTAT	2 Konstruksi Bangunan	TRUB	702.916	1.805.392	1.254.154	(1.453)	(0,0012)	fair	
PROPERTI DAN REAL ESTAT	2 Konstruksi Bangunan	TOTL	790.581	1.000.386	895.484	(1.398)	(0,0016)	fair	
PROPERTI DAN REAL ESTAT	2 Konstruksi Bangunan	ADHI	2.413.950	2.869.948	2.641.949	(4.784)	(0,0018)	fair	
INDUSTRI BARANG KONSUMSI	3 Farmasi	TSPC	2.345.760	2.479.251	2.412.506	338	0,0001	fair	
INDUSTRI BARANG KONSUMSI	3 Farmasi	KAEF	1.177.603	1.281.225	1.219.414	161	0,0001	fair	

			TA-2005	TA-2006	TA-AVG	tax 2006			
DATA BISNIS INDONESIA DAN KOMPAS			Dr	Dr	Dr	Dr(Cr) def	DTE	DTE=>0,003	
DTL NAIK = PLUS; DTA NAIK = MINUS; DTE NAIK = MINUS									
INDUSTRI BARANG KONSUMSI	3 Farmasi	PYFA	76.551	83.127	79.839	(53)	(0,0007)	fair	
INDUSTRI BARANG KONSUMSI	3 Farmasi	DVLA	550.629	557.338	553.984	(778)	(0,0014)	fair	
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA	3 Logam & sejenisnya	TBMS	835.562	955.614	895.588	1.592	0,0018	fair	
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA	3 Logam & sejenisnya	CTBN	1.081.310	1.751.380	1.416.345	(1.580)	(0,0011)	fair	
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA	3 Logam & sejenisnya	ALMI	805.745	1.249.710	1.027.728	(2.429)	(0,0024)	fair	
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA	3 Logam & sejenisnya	INAI	476.734	534.462	505.598	(1.312)	(0,0026)	fair	
INFRASTRUKTUR, UTILITAS DAN TRANSPORTASI	3 Telekomunikasi	BTEL	1.522.583	2.217.139	1.869.861	2.718	0,0015	fair	
INFRASTRUKTUR, UTILITAS DAN TRANSPORTASI	3 Telekomunikasi	IATG	220.296	223.867	222.082	(119)	(0,0005)	fair	
INFRASTRUKTUR, UTILITAS DAN TRANSPORTASI	3 Telekomunikasi	TLKM	62.171.044	75.135.745	68.653.395	(57.275)	(0,0008)	fair	
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI	3 Restoran, Hotel & Pariwisata	PANR	279.803	314.993	297.398	638	0,0021	fair	
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI	3 Restoran, Hotel & Pariwisata	ANTA	234.806	264.669	249.738	(829)	(0,0033)	fair	
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI	3 Restoran, Hotel & Pariwisata	PLIN	1.990.391	2.238.608	2.114.500	2.915	0,0014	fair	
PERTAMBANGAN	3 Pertambangan Logam & Min	CITA	126.419	405.531	265.975	(794)	(0,0030)	fair	
PERTAMBANGAN	3 Pertambangan Logam & Min	TINS	2.748.331	3.462.222	3.105.277	(46)	(0,0000)	fair	
ANEKA INDUSTRI	4 Kabel	SCCO	694.151	673.668	683.910	(180)	(0,0003)	fair	
INDUSTRI BARANG KONSUMSI	4 Kosmetik & Barang Keperlu	UNVR	3.842.351	4.626.000	4.234.176	(3.912)	(0,0009)	fair	
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA	4 Kimia	CLPI	107.668	133.360	120.514	(390)	(0,0032)	fair	
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA	4 Kimia	EKAD	74.768	74.647	74.708	(248)	(0,0033)	fair	
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA	4 Kimia	ETWA	469.923	516.338	493.131	(154)	(0,0003)	fair	
INFRASTRUKTUR, UTILITAS DAN TRANSPORTASI	4 Transportasi	HITS	2.319.235	2.014.766	2.167.001	4.537	0,0021	fair	
INFRASTRUKTUR, UTILITAS DAN TRANSPORTASI	4 Transportasi	SMDR	3.234.643	3.482.429	3.358.536	57	0,0000	fair	
INFRASTRUKTUR, UTILITAS DAN TRANSPORTASI	4 Transportasi	RIGS	681.290	1.047.290	864.290	(26)	(0,0000)	fair	
INFRASTRUKTUR, UTILITAS DAN TRANSPORTASI	4 Transportasi	APOL	2.669.279	3.702.989	3.186.134	(942)	(0,0003)	fair	
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI	4 Advertising, Printing & Media	ABBA	118.763	150.189	134.476	327	0,0024	fair	
PERTAMBANGAN	4 Pertambangan Batu-batuan	CNKO	616.234	734.006	675.120	(533)	(0,0008)	fair	
PERTANIAN	4 Perikanan	CPRO	2.498.007	3.919.605	3.208.806	2.385	0,0007	fair	
INDUSTRI BARANG KONSUMSI	5 Peralatan Rumah Tangga	KDSI	384.928	439.727	412.328	727	0,0018	fair	
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA	5 Plastik & kemasan	APLI	292.309	267.424	279.867	(26)	(0,0001)	fair	
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA	5 Plastik & kemasan	SIMA	65.112	68.544	66.828	(33)	(0,0005)	fair	
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA	5 Plastik & kemasan	AKKU	41.378	51.236	46.307	(68)	(0,0015)	fair	
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA	5 Plastik & kemasan	IGAR	274.804	290.145	282.475	(425)	(0,0015)	fair	
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA	5 Plastik & kemasan	TRST	2.104.464	2.020.478	2.062.471	(3.447)	(0,0017)	fair	
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA	5 Plastik & kemasan	DYNA	1.073.712	1.123.946	1.098.829	(3.014)	(0,0027)	fair	
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI	5 Jasa Komputer & Perangkat	MLPL	7.479.242	5.480.658	6.479.950	5.277	0,0008	fair	

		TA-2005	TA-2006	TA-AVG	tax 2006			
	DTL NAIK = PLUS; NAIK = MINUS; NAIK = MINUS	DTA DTE						
DATA BISNIS INDONESIA DAN KOMPAS		Dr	Dr	Dr	Dr(Cr) def	DTE	DTE=>0,003	
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI	5 Jasa Komputer & Perangkatr	ASGR	518.804	584.839	551.822	230	0,0004	fair
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI	5 Jasa Komputer & Perangkatr	MTDL	666.604	740.800	703.702	(1.109)	(0,0016)	fair
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA	6 Pakan Ternak	JPFA	3.338.840	3.622.463	3.480.652	4.100	0,0012	fair
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA	6 Pakan Ternak	MAIN	314.028	342.757	328.393	(792)	(0,0024)	fair
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI	6 Perusahaan Investasi	BMTR	7.421.334	8.792.985	8.107.160	22.828	0,0028	fair
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI	6 Perusahaan Investasi	PLAS	237.213	185.228	211.221	(525)	(0,0025)	fair
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA	7 Kayu & Pengolahannya	TIRT	856.924	570.117	713.521	1.528	0,0021	fair
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA	7 Kayu & Pengolahannya	BRPT	2.290.291	1.739.140	2.014.716	1.790	0,0009	fair
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI	7 Lainnya	POOL	112.497	127.460	119.979	(5)	(0,0000)	fair
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI	7 Lainnya	RUIS	193.856	329.879	261.868	435	0,0017	fair
								105 perusahaan
ANEKA INDUSTRI	1 Otomotif dan komponennya	SQMI						rug
ANEKA INDUSTRI	1 Otomotif dan komponennya	PRAS						rug
ANEKA INDUSTRI	1 Otomotif dan komponennya	LPIN						rug
ANEKA INDUSTRI	1 Otomotif dan komponennya	IMAS						rug
INDUSTRI BARANG KONSUMSI	1 Makanan & Minuman	SUBA						rug
INDUSTRI BARANG KONSUMSI	1 Makanan & Minuman	ADES						rug
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI	1 Perdagangan Besar Barang	WICO						rug
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI	1 Perdagangan Besar Barang	META						rug
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI	1 Perdagangan Besar Barang	KONI						rug
PERTAMBANGAN	1 Pertambangan Batu Bara	ATPK						rug
PROPERTI DAN REAL ESTAT	1 Properti & Real Estate	PWSI						rug
PROPERTI DAN REAL ESTAT	1 Properti & Real Estate	MDLN						rug
PROPERTI DAN REAL ESTAT	1 Properti & Real Estate	KARK						rug
PROPERTI DAN REAL ESTAT	1 Properti & Real Estate	JIHD						rug
PROPERTI DAN REAL ESTAT	1 Properti & Real Estate	BMSR						rug
PROPERTI DAN REAL ESTAT	1 Properti & Real Estate	BIPP						rug
ANEKA INDUSTRI	2 Tekstil & Garmen	TFCO						rug
ANEKA INDUSTRI	2 Tekstil & Garmen	TEJA						rug
ANEKA INDUSTRI	2 Tekstil & Garmen	SSTM						rug
ANEKA INDUSTRI	2 Tekstil & Garmen	POLY						rug
ANEKA INDUSTRI	2 Tekstil & Garmen	PAFI						rug
ANEKA INDUSTRI	2 Tekstil & Garmen	MYRXP						rug



		TA-2005	TA-2006	TA-AVG	tax 2006	
	DTL NAIK = PLUS; DTA NAIK = MINUS; DTE NAIK = MINUS	Dr	Dr	Dr	Dr(Cr) def	DTE
DATA BISNIS INDONESIA DAN KOMPAS						DTE=>0,003
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI	5 Jasa Komputer & Perangkatr LMAS					rugi
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI	5 Jasa Komputer & Perangkatr INDX					rugi
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI	5 Jasa Komputer & Perangkatr DNET					rugi
PERTANIAN	5 Lainnya BTEK					rugi
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA	7 Kayu & Pengolahannya SUDI					rugi
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA	7 Kayu & Pengolahannya DSUC					rugi
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI	7 Lainnya MITI					rugi
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA	8 Pulp & Kertas TKIM					rugi
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA	8 Pulp & Kertas INKP					rugi
						65 perusahaan
INDUSTRI DASAR DAN KIMIA	1 Semen SMCB					data tidak tersedia
PERTAMBANGAN	1 Pertambangan Batu Bara PKPK					data tidak tersedia
PERTANIAN	1 Palawija/Tanaman Pangan BISI					data tidak tersedia
PROPERTI DAN REAL ESTAT	1 Properti & Real Estate LCGP					data tidak tersedia
PROPERTI DAN REAL ESTAT	1 Properti & Real Estate GPRA					data tidak tersedia
PROPERTI DAN REAL ESTAT	1 Properti & Real Estate BKDP					data tidak tersedia
PROPERTI DAN REAL ESTAT	1 Properti & Real Estate *CTRP					data tidak tersedia
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI	2 Perdagangan Eceran *ACES					data tidak tersedia
PERTANIAN	2 Perkebunan SGRO					data tidak tersedia
PROPERTI DAN REAL ESTAT	2 Konstruksi Bangunan *WIKA					data tidak tersedia
INDUSTRI BARANG KONSUMSI	3 Farmasi SQBB					data tidak tersedia
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI	3 Restoran, Hotel & Pariwisata SHID					data tidak tersedia
INFRASTRUKTUR, UTILITAS DAN TRANSPORTASI	4 Transportasi WEHA					data tidak tersedia
PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI	4 Advertising, Printing & Media MNCN					data tidak tersedia
INFRASTRUKTUR, UTILITAS DAN TRANSPORTASI	5 Konstruksi non Bangunan DEWA					data tidak tersedia
						15 perusahaan

## **Biografi**

Nama Lengkap : Susanto Lam

Tempat & tanggal lahir : Jakarta, 20 Januari 1967

Alamat : Jl. Summagung II J5 No. 1 A, Jakarta 14240

Pendidikan :

PPAk no register D-41488, lulus FE-Universitas Indonesia tahun 2004,  
Sarjana Akuntansi, lulus FE-Universitas Tarumanagara tahun 1992  
SMA, lulus Sekolah Katolik Ricci tahun 1986

Karir :

Akunting Manager, PT Mensa Binasukses, 2002 – saat ini

Internal Audit Manager, PT Tempo, 1997-2002

Internal Auditor, PT Sampoerna Percetakan Nusantara, 1995-1997

Finance & Accounting Manager, PT Lego Toys Indonusa, 1992-1994

Bank Danamon, Internal Auditor, 1990-1992

KAP Machjud Modopuro & rekan, 1989-1990